



# LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2019



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Arif Rahman Hakim Nomor 01 Lumajang Telp. (0334) 881586

E-mail : [kesbangpol@lumajangkab.go.id](mailto:kesbangpol@lumajangkab.go.id)

LUMAJANG



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Kami Panjatkan puji syukur yang sedalam – dalamnya kehadiran Allah SWT. karena atas berkah rahmad dan hidayahnya semata, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, terukur, transparan dan dipertanggungjawabkan.

Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi kelengkapan laporan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja dan peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

*Wassallammu'alaikum. Wr. Wb.*





## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSDUD DAN TUJUAN.....	2
C. GAMBARAN UMUM.....	2
D. DASAR HUKUM.....	6
E. SISTEMATIKA.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS .....	10
B. KEBIJAKAN UMUM.....	12
C. PROGRAM SATUAN KERJA .....	12
D. PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.....	20
A. CAPAIAN KINERJA.....	20
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	31
C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	37
BAB IV PENUTUP .....	40

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019;
2. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN 2019;
3. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2019;
4. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023;
5. PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU INTERIM TAHUN 2019;
6. PENGUKURAN PENCAPAIAN TUJUAN INTERIM TAHUN 2019;
7. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN INTERIM TAHUN 2019;
8. SURAT PERNYATAAN;
9. LAIN – LAIN.



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Berlangsungnya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur Pendukung untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan Aparat pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



## B. MAKSLUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

## C. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, merupakan unsur pendukung tugas Bupati Lumajang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pedoman kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi serta mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan Aparat pelaksana dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Penetapan rencana kerja dan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

- 
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Penyusunan penyusunan pedoman teknis dan penyelenggaraan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Peningkatan pemahaman idiomologi, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
  - Peningkatan kajian masalah strategis dan penanganannya di bidang, politik dalam negeri, ekonomi, sosial budaya dan ketertiban masyarakat;
  - Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
  - Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kajian Masalah Strategis, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Idiomologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - 2. Sub Bidang Pembinaan Wilayah;
- d. Bidang Pengembangan Nilai – nilai Kesatuan Bangsa, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan;
  - 2. Sub Bidang Bela Negara.

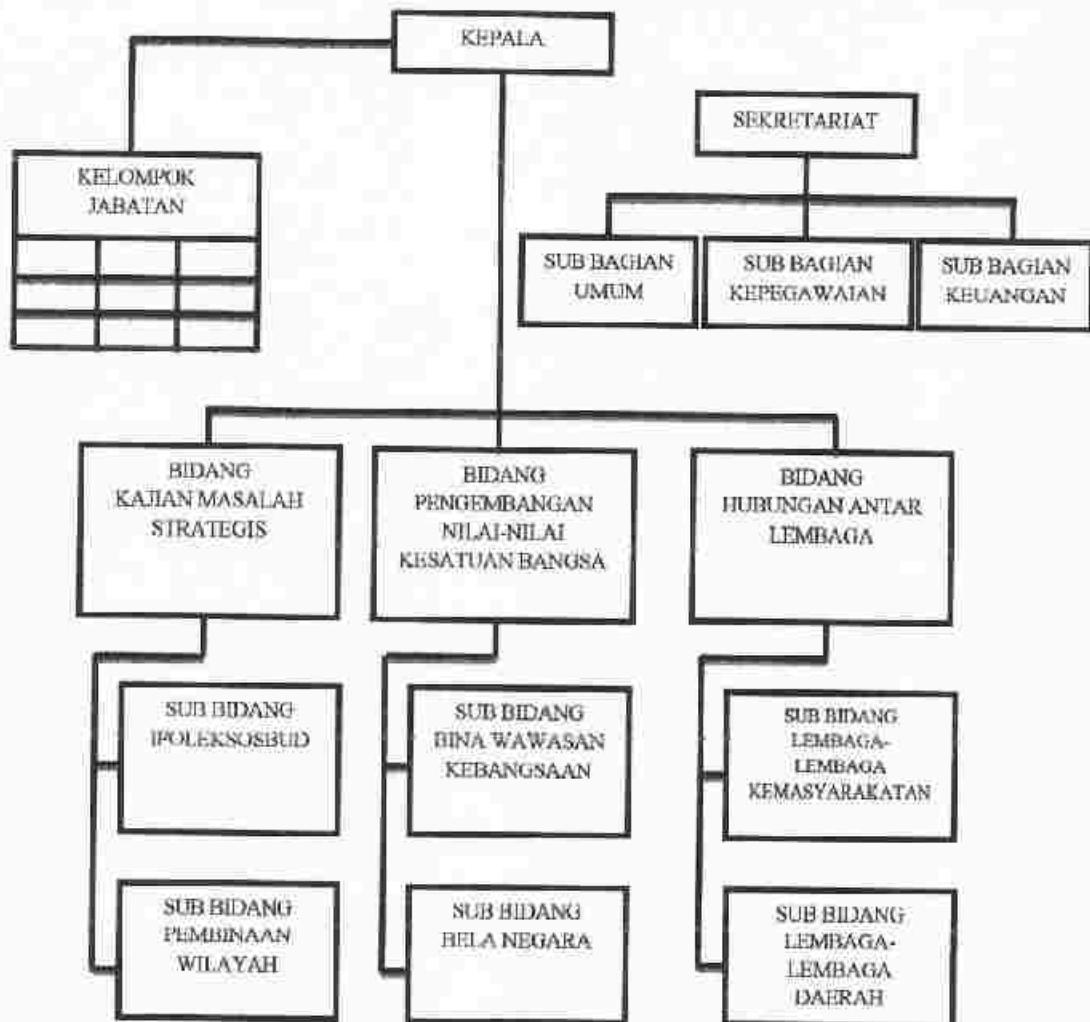


LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

- e. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
  - 1. Sub Bidang Lembaga – Lembaga Kemasyarakatan;
  - 2. Sub Bidang Lembaga – Lembaga Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :

**GAMBAR I**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**





LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang yaitu terdiri dari :

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1

**Jumlah PNS dan PTT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

**Kabupaten Lumajang**

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	SD	1	-	1
2.	SMP	1	-	1
3.	SMA/SMK	10	6	16
4.	D1	-	1	1
5.	D2	-	2	2
	D3	-	-	0
6.	S1	11	6	17
7.	S2	2	-	2
<b>J U M L A H</b>		<b>25</b>	<b>15</b>	<b>40</b>

2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjejangan

Tabel 1.2

**Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjejangan**

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	1
4.	IV	7
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	5 Orang
2.	III	9 Orang
3.	II	10 Orang
4.	I	1 Orang
5.	PTT	15 Orang
Jumlah		40 Orang

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	4 Orang
3.	Eselon IV	7 Orang
4.	Staf	28 Orang
Jumlah		40 Orang

5. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 1.5

Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Jumlah
1.	Mobil Dinas Pimpinan	1 Unit
2.	Mobil Dinas Operasional	3 Unit
3.	Motor Dinas Operasional	21 Unit
Jumlah		25 Unit

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023;



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

## E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Adapun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

### BAB IV : PENUTUP

#### LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019;
2. DPA 2019;
3. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2019;
4. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023;
5. PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU INTERIM TAHUN 2019;
6. PENGUKURAN PENCAPAIAN TUJUAN INTERIM TAHUN 2019;
7. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN INTERIM TAHUN 2019;
8. SURAT PERNYATAAN;
9. LAIN – LAIN.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dan di sajikan ke dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN		TARGET
		URAIAN	INDIKATOR	
1.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyeksosbud	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyeksosbud	1 Kajian

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi yang baik dan bersih, dengan



mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tidak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan –ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Lumajang 5 ( lima ) Tahun kedepan ( 2018 – 2023 ) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum dan program sebagai berikut :

#### B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 adalah:

- Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
- Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa;
- Peningkatan hubungan antar lembaga;
- Pemenuhan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### C. PROGRAM SATUAN KERJA

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang di koordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang merupakan salah satu rangkaian dari proses perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk tindakan dan operasionalnya.

Dalam mencapai tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi itu sendiri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur staf pelaksana koordinasi dan pembinaan dalam fungsi melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan



dan program, kebijakan merupakan arah untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu, sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI/ KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	
Meningkatnya kondusifitas wilayah	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleskosbud	Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban	KAJIAN MASALAH STRATEGIS	1. Pembinaan Wilayah 2. Peningkatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		Peningkatan pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa		PENGEMBANGAN NILAI - NILAI KESATUAN BANGSA	1. Pembinaan Bela Negara 2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
		Peningkatan hubungan antar lembaga		HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	1. Pembinaan dan fasilitasi lembaga - lembaga daerah 2. Pembinaan dan fasilitasi lembaga - lembaga kemasyarakatan



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI/ KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
		Pemenuhan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
			PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
			PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP 2. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat



#### D. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 Program dan 11 Kegiatan, yang terdiri atas :



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Tabel. 2.3  
**PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2019**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persepsi masalah strategis yang ditampilkan (terlait Ipolyekosbud dan Tihmas)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyekosbud	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyekosbud	Peningkatan kewaspadaan dan masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban.	Kajian Masalah Strategis	Meningkatnya kajian masalah strategis	Jumlah potensi rusaklah strategis	1.323 Potensi Masalah
					Pembinaan Wilayah	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan bina wilayah	Jumlah SKD yang terdokasi tentang permasalahan konflik IPOLEKOSBUD	50 SKD	
					Peningkatan ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah desa rawan konflik yang terpantau	140 Desa	
					Peningkatan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	PENGEMBANGAN NILAI - NILAI KESATUAN BANGSA	Meningkatnya pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	Jumlah fasilitasi deteksi dan cegah diti terkait permasalahan IPOLEKOSBUD	32 Fasilitasi
						Pembinaan Bela Negara	Meningkatnya pembinaan bela negara	Jumlah fasilitasi pengamanan tertutup	170 Fasilitasi
								Jumlah fasilitasi pemantauan orang asing	2 Fasilitasi
								Fersentase capatan pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	33,33%
								Jumlah fasilitasi: meningkatkan nilai-nilai Bela Negara	9 Fasilitasi
								Jumlah fasilitasi: meningkatkan ilwa gotong royong	1 Fasilitasi
								Jumlah kecamatan turpantai dalam kerukunan umat beragama	5 Kecamatan
								Jumlah kecamatan terpantai dalam kerukunan suku, budaya, dan ras	2 Kecamatan
								Jumlah siswa yang terdokasi wawasan kebangsaan	4.200 Siswa



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan hubungan antar lembaga	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Meningkatnya hubungan antar lembaga	Persentase capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi	8,2 %
						Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lemtuga - Lembaga Daerah	Jumlah fasilitasi lembaga -lembaga daerah	9 Lembaga Daerah
						Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah upaya pemerataan masyarakat IPOLEKSOSBUD yang terpantau	500 Terpantau
					Peningkatan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Ormas yang terfasilitasi dan hitung Organisasi	7 Organisasi
						Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran tersedia	26 jenis
						PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
						Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung, peralatan dan perlengkapan yang layak fungsi	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5 Jenis
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya tingkat pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	8 Jenis



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Urutan Program/ Kegiatan	Susunan Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	5 (38 Eksemplar)
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel	3 (32 Eksemplar)
						Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel	2 (6 Eksemplar)



---

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, Tujuan dan Sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kesataun Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Lumajang yang tertuang pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Tabel 3.2  
Pengukuran Capaian Tujuan Tahun 2019

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	100	100	100

Tabel 3.2  
Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2019

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (Kajian)	REALISASI (Kajian)	CAPAIAN (Kajian)
1.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipoleksosbud	1	1	100%

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2019, disajikan dalam tabel berikut :



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaihan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipolyekosbud dan Tibusas)	Meningkatnya keamanan dan ketenamanan wilayah di bidang Ipolyekosbud	Jumlah wajah terkait keamanan dan ketenamanan wilayah di bidang Ipolyekosbud	Peningkatan kewaspadaan dan masyarakat terhadap masalah, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban.	Kajian Masalah Strategis	Meningkatnya kajian masalah strategis	Jumlah potensi masalah strategis	1.323 Potensi Masalah	260 Potensi Masalah	19,65%
					Pembinaan Wilayah	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan bina wilayah	Jumlah SKD yang tereduksi tentang penggunaan konflik IPOLEKOSBUD	50 SKD	50 SKD	100%	
					Peningkatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah fasilitasi deteksi dan cepat dini terkait permasalahan IPOLEKOSBUD	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	100%	
					PENGEMBANGAN NILAI - NILAI KESATUAN BANGSA	Meningkatnya pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	Jumlah fasilitasi pengamanan teritorip	170 Fasilitasi	883 Fasilitasi	519,41%	
					Pembinaan Bela Negara	Meningkatnya pembinaan bela negara	Jumlah fasilitasi peningkatan puwa gotong royong	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pembinaan warisan kebangsaan	Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%	
							Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan suku, budaya, dan rasi	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%	
							Jumlah siswa yang teredukasi wawasan	4.200 Siswa	4.200 Siswa	100%	



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaiannya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan hubungan antar lembaga	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Meningkatnya hubungan antar lembaga	Persentase capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi	8,2 %	9,55%	116,46%
					Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Jumlah fasilitasi lembaga - lembaga daerah	9 Lembaga Daerah	12 Lembaga Daerah	133,33%	
					Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah upaya pemerintah mensabah IPOLEN SOSRU yang terpantau	500 Terpantau	580 Terpantau	116%	
					Pemenuhan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Ormas yang terfasilitasi dan hilih	7 Organisasasi	10 Organisasi	142,86%
						Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran tersedia	26 jenis	26 jenis	100%
						PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%	100%
						Pembangunan / Pengraian dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung, peralatan dan perlengkapan yang layak fungsi	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5 jenis	4 jenis	80%



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaihan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemeliharaan Rutin/Berikala Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya tingkat pememahan Pemeliharaan Rutin / Berikala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	8 Jenis	8 Jenis	100%
						<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPOIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Meningkatnya capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	5 (38 Eksamplar)	5 (38 Eksamplar)	100%
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel	3 (32 Eksamplar)	3 (32 Eksamplar)	100%
						Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel	2 (6 Eksamplar)	2 (6 Eksamplar)	100%



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Tabel 3.4  
Jumlah Kejadian Terkait Poleksosbud dan Tibmas  
Tahun 2019

- a. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

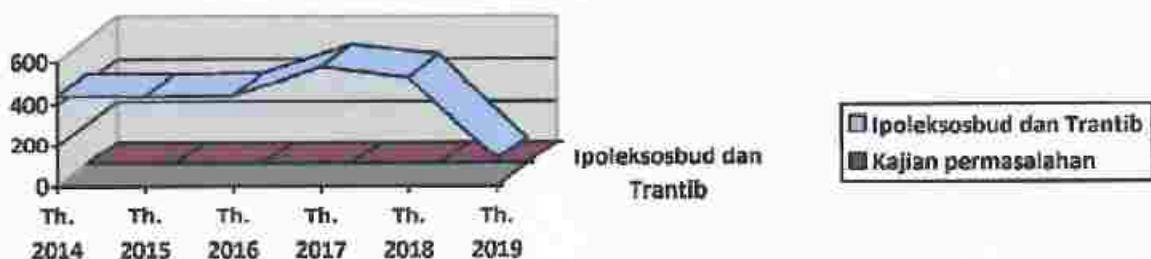
No.	Sasaran/Kinerja Utama	Jumlah permasalahan konflik IPOLEKSOSBUD	Jumlah Kajian terkait permasalahan IPOLEKSOSBUD	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	5
1.	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Wilayah di Bidang Ipoleksosbud	132	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUMLAH KAJIAN DAN KONFLIK SOSIAL TERKAIT POLEKSOSBUD					
	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
POLEKSOSBUD	442	438	442	576	530	132
JUMLAH KAJIAN	-	-	-	-	-	1

- Grafik Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Wilayah di Bidang Ipoleksosbud..





LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

Pada tabel serta grafik diatas dari Pencapaian 5 Tahun di Tahun 2014 S.d 2019 jumlah kejadian mengalami Fluktuatif di prosentase rata-rata 5% sedangkan apabila dibandingkan antara 2018 dan 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan mencapai 25 % dengan berpredikat sangat baik.

c. Hasil Capaian Program yang menunjang keberhasilan sasaran Strategis meningkatkan keamanan dan kenyamanan wilayah di Bidang Ipolesosbud.

– Kajian Masalah Strategis

Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Kajian Masalah Strategis	Meningkatnya kajian masalah strategis	Jumlah potensi masalah strategis	1.323 Potensi Masalah	260 Potensi Masalah	19,65%
Pembinaan Wilayah	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan bina wilayah	Jumlah SKD yang teredukasi tentang pengamanan konflik IPOLEKSOSBUD	50 SKD	50 SKD	100%
		Jumlah desa rawan konflik yang terpantau	140 Desa	31 Desa	22,14%
Peningkatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah fasilitasi deteksi dan cegah dini terkait permasalahan IPOLEKSOSBUD	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	100%
		Jumlah fasilitasi pengamanan tertutup	170 Fasilitasi	883 Fasilitasi	519,41%
		Jumlah fasilitasi pemantauan orang asing	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%

Penjelasan tabel Kajian masalah Strategis dapat diartikan 6 komponen penting telah memenuhi target, salah satu yang menarik adalah 1 komponen dari peningkatan kewaspadaan permasalahan bina wilayah dengan target 140 Desa terealisasi sebesar 31 Desa hal ini disebabkan karena kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak memadai sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berinisiatif pelibatan komponen pembantu agar koordinasi antar lini penyelenggara Kamtibmas dalam hal pemantauan keamanan, Kenyamanan dan ketertiban masyarakat berjalan dengan baik sehingga tercipta Kabupaten Lumajang yang kondusif.



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

**– Peningkatan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa**

Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
PENGEMBANGAN NILAI - NILAI KESATUAN BANGSA	Meningkatnya pengembangan nilai - nilai kesatuan bangsa	Percentase capaian pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	33,33%	33,34%	100,03%
Pembinaan Bela Negara	Meningkatnya pembinaan bela negara	Jumlah fasilitasi peningkatan nilai - nilai Bela Negara	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	100%
		Jumlah fasilitasi peningkatan Jiwa Gotong Royong	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%
		Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan suku, budaya, dan ras	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%
		Jumlah siswa yang tereduksi wawasan kebangsaan	4.200 Siswa	4.200 Siswa	100%

Penjelasan tabel Peningkatan nilai-nilai kesatuan bangsa dapat diartikan 5 komponen penting telah memenuhi target tercapai 100%. Dengan adanya 5 komponen program yang terfasilitasi memberikan gambaran dan pemetaan kerawanan konflik sosial di Kabupaten Lumajang, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kabupaten Lumajang. Adapun komponen yang dapat menekan konflik sosial masyarakat diantaranya :

- Peningkatan nilai-nilai Bela Negara di Masyarakat
- Peningkatan Jiwa Gotong Royong di Masyarakat
- Pemantauan Aktivitas warga dalam bingkai kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan di 5 Tempat yang berbeda
- Pemantauan Aktivitas warga dalam bingkai kerukunan antar, Suku, Ras yang dilaksanakan di 2 Tempat yang berbeda.
- Edukasi Pemuda-pemudi/Siswa-Siswi terkait wawasan kebangsaan.

**– Hubungan Antar Lembaga**

Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Meningkatnya hubungan antar lembaga	Percentase capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi	8,2 %	9,55%	116,46%
Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Jumlah fasilitasi lembaga - lembaga daerah	9 Lembaga Daerah	12 Lembaga Daerah	133,33%
		Jumlah upaya pemecahan masalah IPOLEKSOSBUD yang terpantau	500 Terpantau	590 Terpantau	118%
Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi dan hilish	7 Organisasi	10 Organisasi	142,86%
		Jumlah Ormas / LSM yang terfasilitasi kelembagamannya	176 Organisasi	195 Organisasi	105,11%

Penjelasan tabel Hubungan antar Lembaga dapat diartikan 5



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

komponen penting telah memenuhi target lebih dari 100% atau lebih dari yang ditetapkan. Dengan adanya Permendagri baru yang mengatur Pendaftaran, Pengelolaan, Pengawasan, kerjasama Kemendagri dengan Pemerintah Daerah dengan Lembaga Orkemas dan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi kepada masyarakat tentang Orkemas untuk itu setiap tahun diadakan pembinaan kepada pengurus dan anggota LSM/Orkemas. Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lumajang tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun data Update jumlah Ormas dan LSM yang ada wilayah Kabupaten Lumajang baik yang aktif maupun sudah tidak aktif sebagai berikut :

No.	Kategori Organisasi	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Keterangan
1.	LSM	45	13	32	-
2.	ORMAS	133	83	50	-
3.	Keagamaan	14	11	3	-
4.	Profesi	38	22	16	-
5.	Budaya	10	2	8	-
6.	Pemuda	14	9	5	-
7.	Wanita	16	12	4	-
8.	Yayasan/Lembaga	17	9	8	-
9.	Sosial	24	18	6	-
10.	Partai Politik	16	16	-	-

d. Penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019

Dengan meningkatnya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Lumajang dengan penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2018 s/d 2019 dengan capaian penurunan 25 %, capain tersebut diperoleh dengan pelibatan masyarakat yang dibentuk dalam suatu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibantu oleh SKD (Satgas keamanan Desa), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum pembauran kebangsaan (FPK),



Ormas maupun LSM yang di fasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Dalam rangka mengupayakan kondisi lingkungan Kehidupan masyarakat yang semakin kondusif, dibuatlah Peta Rawan Konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kabupaten Lumajang. Hasil yang diharapkan dari Pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kabupaten Lumajang sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kabupaten Lumajang

maka Pemerintah Kabupaten Lumajang di Tahun 2020 akan terus berkoordinasi langsung dengan jajaran samping (Polres dan Kodim 0821 Lumajang) dalam hal ini sudah mempunyai ikatan dalam TIM Kewaspadaan Daerah yang sudah dibentuk dan ter-SK kan bertanda tangan Bapak Bupati Lumajang guna mengantisipasi kerawanan gangguan lingkungan / cegah dini dan deteksi dini.

Penjelasan diatas mempunyai pengaruh pada Lingkungan eksternal diantaranya sebagai berikut :

- Adanya sistem koordinasi dengan instansi/lembaga terkait baik horizontal maupun vertikal dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan;
- Dalam kegiatan-kegiatan tertentu terdapat adanya supervise dari Pemerintah propinsi dan atau Pemerintah pusat;
- Adanya dukungan kemitraan dari warga masyarakat, khususnya Orkemas/LSM yang bergerak dalam bidang Politik, kewaspadaan bangsa dan ketahanan bangsa, terpeliharanya kerukunan umat beragama
- Adanya sistem koordinasi baik vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan tugas/kegiatan/penanganan masalah;
- Adanya tugas-tugas/ urusan yang tidak ditangani oleh salah satu instansi di OPD namun mengharuskan untuk dilaksanakan.



## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2019 merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Keseluruhan program dan kegiatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.707.000.000,-. Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Target Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019**

### **1. Meningkatnya Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan	Target RENSTRA /RPJMD	Anggaran Tahun 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	5 Tahun	747.589.000,-	712.335.100,-	95,28 %

### **2. Meningkatnya tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**

Kegiatan	Target RENSTRA/ RPJMD	Anggaran Tahun 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Tahun	175.500.000,-	173.731.000,-	98,99 %
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Tahun	215.535.000,-	214.854.450,-	99,68 %



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

**3. Meningkatnya capaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel**

Kegiatan	Target RENSTRA/RPJMD	Anggaran Tahun 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	5 Tahun	1.665.000,-	1.657.950,-	99,58 %
2. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	5 Tahun	3.000.000,-	3.000.000,-	100 %

**4. Meningkatnya kajian masalah strategis**

Kegiatan	Target RENSTRA/RPJMD	Anggaran Tahun 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1. Pembinaan Wilayah	5 Tahun	322.125.000,-	322.122.500,-	100 %
2. Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	5 Tahun	612.535.000,-	602.440.000,-	98,35 %

**5. Meningkatnya pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa**

Kegiatan	Target RENSTRA/RPJMD	Anggaran Tahun 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1. Pembinaan Bela Negara	5 Tahun	276.861.000,-	263.455.000,-	95,16 %
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan	5 Tahun	100.120.000,-	99.587.000,-	99,47 %

**6. Meningkatnya hubungan antar lembaga**

Kegiatan	Target RENSTRA/RPJMD	Tahun 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1. Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	5 Tahun	84.370.000,-	83.020.000,-	98,40 %
2. Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	5 Tahun	167.700.000,-	167.700.000,-	100 %

Dari data - data tersebut, berikut adalah capaian kinerja dan anggaran badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 :



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019**

**Tabel 3.6  
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN  
TAHUN 2019**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Draian Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
									Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Meningkatnya kondisifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terdiri: poleksosbud dan Tibrmas)	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang poleksosbud	Jumlah kajian terkait kesamanan dan kenyamanan wilayah di bidang poleksosbud	Peningkatan kewaspadaan diri masyarakat terhadap masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban	Rajian Masalah Strategis	Meningkatnya kajian masalah strategis	Jumlah potensi masalah strategis	1.373 Potensi Masalah	260 Potensi Masalah	19,65%	934.660.000,-	924.562.500,-	98,92 %
						Pembinaan Wilayah	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan bina wilayah	Jumlah SKD yang teredukasi tentang pengamanan konflik IPOLERSUSBUD	50 SKD	50 SKD	100%	322.125.000,-	322.122.500,-	100 %
							Jumlah desa rawan konflik yang terpantau	140 Desa	31 Desa	22,14%				
							Meningkatnya kewaspadaan permasalahan lidodagi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah fasilitasi deteksi dan cegah diri terhadap permasalahan IPOLERSUSBUD	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	100%	612.535.000,-	602.440.000,-	98,35 %
							Jumlah fasilitasi pengamanan tertutup	170 Fasilitasi	883 Fasilitasi	519,41%				
							Jumlah fasilitasi pemantauan orang asing	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	100%				
						PENGEMBANGAN NILAI - NILAI KESATUAN BANGSA	Meningkatnya pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	Persentase capaian pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	33,33%	33,34%	100,03%	376.981.000,-	363.042.000,-	96,30 %
						Pembinaan Bela Negara	Meningkatnya pembinaan bela negara	Jumlah fasilitasi pengingktan nilai-nilai Bela Negara	9 Fasilitasi	9 Fasilitasi	100%	276.861.000,-	263.455.000,-	95,16 %
							Jumlah fasilitasi peningkatan	1 Fasilitasi	1 Fasilitasi	100%				



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Urutan Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Ket.		
									Target	Realisasi	Capaiian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaiian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
							Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat bangsa	5 Kecamatan	5 Kecamatan	100%	100.120.000,-	99.587.000	99,47 %		
									Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan suku, budaya, dan ras	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%					
									Jumlah siswa yang terdesaksi wawasan kebangsaan	4.200 Siswa	4.200 Siswa	100%					
							Peningkatan hubungan antar lembaga	RUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Meningkatnya hubungan antar lembaga	Percentase capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi	8,2 %	9,55%	116,46%	152.070.000,-	250.720.000	99,46 %	
							Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Daerah	Jumlah fasilitasi lembaga - lembaga daerah	9 Lembaga Daerah	12 Lembaga Daerah	133,33%	84.370.000,-	83.020.000,-	98,40 %		
									Jumlah upaya pemecahan masalah IPOLIKSOSBUD yang terpantau	500 Terpantau	590 Terpantau	118%					
							Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan dan fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi dana bantuan	7 Organisasi	10 Organisasi	142,86%	167.700.000,-	167.700.000,-	100 %		
									Jumlah Ormas / LSM yang terfasilitasi kelengkngannya	176 Organisasi	185 Organisasi	105,11%					



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No.	Tujuan	Indicator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program/ Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Ket.			
									Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
									Peningkatan tata kelola bidang kesatuan bangsa dan politik	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pementahan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase pementahan terhadap kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	747.589.000,-	712.335.100,-	95,28 %
									Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran tersedia	26 jenis	26 jenis	100%	747.589.000,-	712.335.100,-	95,28 %	
									PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pemerintahan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pementahan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%	100%	391.035.000,-	388.585.450	99,37 %	
									Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pementahan kebutuhan gedung, pendidikan dan perlengkapan yang layak fungsi	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5 jenis	4 jenis	80%	175.500.000,-	173.731.000,-	98,99 %	
									Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya tingkat pementahan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang diperlihara	8 jenis	8 jenis	100%	215.535.000	214.854.450,-	99,68 %	



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

No.	Tujuan	Indicator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Ket.
									Target	Realisasi	Capaihan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaihan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya capaian laporan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	5 (38 Eksemplar)	5 (38 Eksemplar)	100%	4.665.000,-	4.657.950,-	99,85 %	
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel	3 (32 Eksemplar)	3 (32 Eksemplar)	100%	1.665.000,-	1.657.950,-	99,58 %	
						Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penyusunan Laporan indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel	Jumlah laporan indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel	2 (6 Eksemplar)	2 (6 Eksemplar)	100%	3.000.000,-	3.000.000,-	100 %	



Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang bahwa tingkat akuntabilitas keuangan dan kinerja sangat efisien dan efektif.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan program pembangunan sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan sebagaimana Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dinilai baik, hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai unit pelaksana dinilai baik, secara lengkap mekanisme pencapaian nilai prosentase pengukuran kinerja kegiatan ditampilkan pada Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS).

### C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan tupoksi
2. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi
3. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal
4. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kedulian pada proses demokratisasi.
5. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum maksimal



- 
6. Peraturan perundang- undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Dengan keterbatasan Sumber daya serta penempatan Pegawai Bakesbangpol yang tidak sesuai maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai langkah strategis Yakni dengan pelibatan Unsur-unsur pembantu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperhi Halnya FKDM, FKUB, FPK serta Ormas dan LSM.
2. Dengan belum optimalnya pelatihan yang substantif maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan Bimtek terkait system Informasi yang termanajemen dengan baik seperti Halnya Bimtek Intelijen dengan melibatkan unsur dan jajaran samping.
3. Dengan perubahan Gaya Hidup Masyarakat saat ini dengan pengaruh perkembangan Tekhnologi maka Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai rencana bekerja sama dengan Unsur terkait dalam Akses kemajuan teknologi, informatika, dan komunikasi sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal serta menggiring demokratisasi di Masyarakat sehingga memunculkan Jati diri daerah tertanam dijiwa masyarakat, serta terus, meningkatkan nilai-nilai keagamaaan. Dalam hal ini, media sangat berperan besar dalam proses sosialisasi kepada masyarakat.
4. Dengan Minimnya anggaran membawa dampak tersendiri dalam Organisasi, Hal ini dapat diatasi dengan sering berkoordinasinya Badan



LAPORAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019

---

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan unsur terkait dalam permasalahan-permasalahan yang muncul di Wilayah
6. Dengan Tidak konsistennya perundang-undangan serta tumpang tindihnya peraturan pemerintah dalam Hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan unsur terkait seperti Halnya Bagian Hukum Setda Lumajang dalam perumusan-perumusan keputusan Bupati yang akan dibuat.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang Tahun 2019 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukkan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. BASUNI

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

# **PERJANJIAN KINERJA (PK)**

## **TAHUN 2019**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. BASUNI

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.M.

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
H. THORIQUL HAQ, M.M.  
*[Signature]*

Drs. BASUNI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyeksbud	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyeksbud	1 Kajian

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 747.589.000	APBD II
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 391.035.000	APBD II
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 4.665.000	APBD II
4.	Kajian Masaalah Strategis	Rp. 934.660.000	APBD II
5.	Pengembangan Nilai – Nilai Kesatuan Bangsa	Rp. 376.981.000	APBD II
6.	Hubungan Antar Lembaga	Rp. 252.070.000	APBD II
JUMLAH		Rp. 2.707.000.000	



Lumajang, 30 Agustus 2019  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG  
Dr. BASUNI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM

Jabatan : Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Name : Drs. BASUNI

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
Drs. BASUNI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Pihak Pertama,  
  
Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670604 199302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
3.	Meningkatnya capaian pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	5 Jenis

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 747.589.000	APBD II
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 391.035.000	APBD II
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 4.665.000	APBD II
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.143.289.000</b>	

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG

  
Drs. BASUH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019

Sekretaris

  
Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670604 199302 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LULUK MASLUHA**

Jabatan : Plt. Kasubag. Umum pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM**

Jabatan : Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670604 199302 1 001

Pihak Pertama,

LULUK MASLUHA  
Penata Tingkat I  
NIP. 19630929 198510 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung, peralatan dan perlengkapan yang layak fungsi	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5 Jenis
2.	Meningkatnya pemenuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	8 Jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 175.500.000	APBD II
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 215.535.000	APBD II
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 391.035.000</b>	

Sekretaris

Drs. AGOENS PAMERDI SEMBODO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670604 199302 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Pit. Kasubag. Umum

  
LULUK MASLUHA  
Penata Tingkat I  
NIP. 19630929 198510 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LULUK MASLUHA**

Jabatan : Kasubag. Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM**

Jabatan : Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670604 199302 1 001

Pihak Pertama,

LULUK MASLUHA

Penata Tingkat I  
NIP. 19630929 198510 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang akuntabel.	3 Jenis (32 Eksamplar)
2.	Meningkatnya penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat tepat waktu.	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat yang akuntabel.	2 Jenis (6 Eksamplar)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Rp. 1.665.000	APBD II
2. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp. 3.000.000	APBD II
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.665.000</b>	

Sekretaris

Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19610103 199103 1 006

Lumajang, 30 Agustus 2018  
 Kasubag. Kepegawaian

LULUK MASLUHA  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19630929 198510 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI ELIAGUSTIN, SE

Jabatan : Kasubag. Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM

Jabatan : Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670604 199302 1 001

Pihak Pertama,

DWI ELIAGUSTIN, SE  
Penata  
NIP. 19780811 201101 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran tersedia	26 Jenis

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran.	Rp. 747.589.000	APBD II
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 747.589.000</b>	

Sekretaris

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Kasubag. Keuangan

  
Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670604 199302 1 001

  
DWI ELIAUGUSTIN, SE  
Panata  
NIP. 19780811 201101 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JOKO SAMBANG, S.Pd., MM**  
Jabatan : Kepala Bidang Kajian Masalah Strategis ( KMS )  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BASUNI**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
  
**Drs. BASUNI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
  
  
**JOKO SAMBANG, S.Pd., MM**  
Pembina  
NIP. 19710407 199802 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kajian masalah strategis.	Jumlah potensi masalah strategis yang terjadi	1.323 Potensi Masalah

Program	Anggaran	Keterangan
1. Kajian Masalah Strategis	Rp. 934.660.000	APBD II
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 934.660.000</b>	

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. BASUNI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Kabid. Kajian Masalah Strategis

JOKO SAMBANG, S.Pd., MM  
Pembina  
NIP. 19710407 199802 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUSILO, SH.**  
Jabatan : Kasubid. Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD)  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

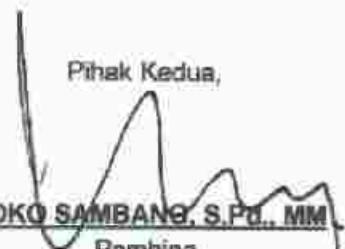
Nama : **JOKO SAMBANG, S.Pd., MM**  
Jabatan : Kabid. Kajian Masalah Strategis (KMS)  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,  
  
**JOKO SAMBANG, S.Pd., MM**  
Pembina  
NIP. 19710407 199802 1 003

Pihak Pertama,  
  
**SUSILO, SH**  
Penata  
NIP. 19640714 199403 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kewaspadaan permasyarakat Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah fasilitasi deteksi dan cegah dini terkait permasalahan IPOLEKSOSBUD	12 Fasilitasi
		Jumlah fasilitasi pengamanan tertutup	170 Fasilitasi
		Jumlah fasilitasi pemantauan orang asing	2 Fasilitasi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 612.535.000	APBD II
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 612.535.000</b>	

Kabid. Kajian Masalah Strategis

JOKO SAMBANG, S.Pd., MM

Pembina

NIP. 19710407 199802 1 003

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Kasubid. Ipoeksosbud.

SUSILO, SH

Penata

NIP. 19640714 199403 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TOTOK HERU SUKINDAR TIYONO, S.Pd.**  
Jabatan : Kasubid. Pembinaan Wilayah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JOKO SAMBANG, S.Pd., MM**  
Jabatan : Kabid. Kajian Masalah Strategis (KMS)  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,  
  
**JOKO SAMBANG, S.Pd., MM**  
Pembina  
NIP. 19620727 198512 1 001

Pihak Pertama,  
  
**TOTOK HERU SUKINDAR TIYONO, S.Pd.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19641212 199501 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan bina wilayah	Jumlah SKD yang tereduksi tentang pengamanan konflik IPOLEKSOSBUD	50 SKD
		Jumlah desa rawan konflik yang terpantau	140 Desa

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Wilayah	Rp.	322.125.000	APBD II
JUMLAH	Rp.	322.125.000	

Kabid. Kajian Masalah Strategis

JOKO SAMBANG, S.Pd., MM  
 Pembina  
 NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
 Kasubid. Pembinaan Wilayah

  
TOTOK HERU S.T., S.Pd.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19641212 199501 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUR SAMSI, SH**  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa (PNK)  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BASUNI**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diletakkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
Drs. **BASUNI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Pertama,  
  
  
**NUR SAMSI, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19690203 199302 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program (1) (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	Percentase capaian pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa	33,33 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Nilai – Nilai Kesatuan Bangsa	Rp. 376.981.000	APBD II
Jumlah	Rp. 376.981.000	

KEPALA KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. BASUNI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Kabid. Pengembangan Nilai-Nilai  
Kesatuan Bangsa

**NUR SAMSI, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19690203 199302 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIWIK HARIYANI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Wewasan Kebangsaan  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR SAMSI, SH

Jabatan : Kabid. Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa (PNK)  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

NUR SAMSI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19690203 199302 1 001

Pihak Pertama,

WIWIK HARIYANI, SE

Penata

NIP. 19750512 199403 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan umat beragama	5 Kecamatan
		Jumlah kecamatan terpantau dalam kerukunan suku, budaya, dan ras	2 Kecamatan
		Jumlah siswa yang teredukasi wawasan kebangsaan	4 200 Siswa

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Rp. 100.120.000	APBD II
	Jumlah	Rp. 100.120.000	

Kabid. Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa

**NUR SAMSİ, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19690203 199302 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
 Kasubid. Wawasan Kebangsaan

**WIWIK HARIYANI, SE**

Penata

NIP. 19750512 199403 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CRISTINA YULIANI, S.Pd

Jabatan : Plt. Kasubid. Bela Negara pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR SAMSI, SH

Jabatan : Kabid. Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa (PNK)  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

**NUR SAMSI, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19690203 199302 1 001

Pihak Pertama,

**CRISTINA YULIANI, S.Pd**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19850713 199103 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembinaan Bela Negara	Jumlah fasilitasi peningkatan nilai-nilai Bela Negara	9 Fasilitasi
		Jumlah fasilitasi peningkatan jiwa gotong royong	1 Fasilitasi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Bela Negara	Rp. 276.861.000	APBD II
Jumlah	Rp. 276.861.000	

Kabid. Pengembangan Nilai-Nilai  
Kesatuan Bangsa

**NUR SAMSI, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19690203 199302 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Plt. Kasubid. Bela Negara

**CRISTINA YULIANI, S.Pd**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19650713 199103 2 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ABU HASAN**  
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Antar Lembanga ( HAL )  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BASUNI**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Pertama,

**Drs. ABU HASAN**

Pembina

NIP. 19820801 199303 1 001

Pihak Kedua,

**Drs. BASUNI**

Pembina Tingkat I

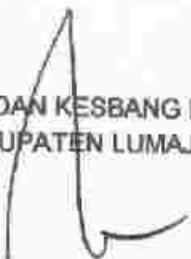
NIP. 19620727 198512 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (4)
1.	Meningkatnya hubungan antar lembaga	Persentase capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dibina dan difasilitasi	8,2 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Hubungan Antar Lembaga	Rp. 252.070.000	APBD II
Jumlah	Rp. 252.070.000	

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG

  
Drs. BASUKI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620727 198512 1 001

Lumajang, 30 Agustus 2019  
Kabid. Hubungan Antar Lembaga

  
Drs. ABU HASAN  
Pembina  
NIP. 19620801 199303 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI PURWANTO, S.Pd.  
Jabatan : Kasubid. Lembaga-Lembaga Daerah  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ABU HASAN  
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Antar Lembanga ( HAL )  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

Drs. ABU HASAN  
Pembina  
NIP. 19620801 199303 1 001

Pihak Pertama,

ADI PURWANTO, S.Pd.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661215 198603 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi lembaga-lembaga daerah.	Jumlah fasilitasi lembaga-lembaga daerah	9 Lembaga Daerah
		Jumlah upaya pemecahan masalah IPOLEKSOSBUD yang terpantau	500 Terpantau

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Lembaga Daerah.	Rp. 84.370.000	APBD II
Jumlah	Rp. 84.370.000	

Kabid. Hubungan Antar Lembaga

Lumajang, 30 Agustus 2019  
 Kasubid. Lembaga-Lembaga Daerah

Drs. ABU HASAN  
 Pembina  
 NIP. 19620801 199303 1 001

ADI PURWANTO, S.Pd.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19661512 198603 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GURUH EKO YULIANTO, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. ABU HASAN**  
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga ( HAL )  
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 30 Agustus 2019

Pihak Kedua,

**Drs. ABU HASAN**  
Pembina  
NIP. 19620801 199303 1 001

Pihak Pertama,

**GURUH EKO YULIANTO, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790707 200801 1 021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi lembaga - lembaga kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terfasilitasi dana hibah	7 Organisasi
		Jumlah Ormas / LSM yang terfasilitasi kelembagaannya	176 Organisasi

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga - Lembaga Kemasyarakatan Jumlah	Rp. 167.700.000 Rp. 167.700.000	APBD II

Kabid Hubungan Antar Lembaga

Lumajang, 30 Agustus 2019  
 Kasubid. Lembaga – Lembaga  
 Kemasyarakatan

**Drs. ABU HASAN**  
 Pembina  
 NIP. 19620801 199303 1 001

**GURUH EKO YULIANTO, S.Sos**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19790707 200801 1 021

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)**

**TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NO. 68 TAHUN 2019

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KABUPATEN LUMAJANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
Tahun Anggaran 2019**

Formulir  
DPPA SKPD

Unit Pelaksanaan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	5.191.491.375,00	5.353.160.018,00	161.668.543,00	3,11%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.484.491.375,00	2.646.160.018,00	161.668.543,00	6,51%
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.484.491.375,00	2.646.160.018,00	161.668.543,00	6,51%
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.707.000.000,00	2.707.000.000,00	0,00	0,00%
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	332.822.000,00	332.082.000,00	(540.000,00)	(0,16)%
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.190.878.000,00	2.199.418.000,00	8.540.000,00	0,39%
5.2.4	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	98.500.000,00	90.500.000,00	(8.000.000,00)	(8,12)%
5.2.5	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00%
	Surplus/Defisit	(5.191.491.375,00)	(5.353.160.018,00)	(161.668.543,00)	3,11%

**Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah Per Triwulan**

No	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Belanja Tidak Langsung	621.122.842,00	670.699.100,00	638.877.450,00	715.460.626,00	2.645.160.018,00
1.2	Belanja Langsung	541.469.600,00	814.107.500,00	811.777.500,00	539.625.500,00	2.707.000.000,00
1.1	Penerimaan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pengeluaran Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lumajang, 02 September 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 

1.05	02	00	00	5	1
------	----	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PENGGUNA ANGGARAN/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : WIJI UTAMI

NIP : 19690418 199202 2 003

JABATAN : BUD/Kuasa BUD

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD  
1.05 02 00 00 5 1

Formulir  
DPPA SKPD 2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Latar belakang perubahan / diangarkan pendapatan dalam perubahan APBD :

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)		
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6
5	BELANJA				2.484.491.375,00				2.646.160.018,00	161.668.643,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2.484.491.375,00				2.646.160.018,00	161.668.643,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI				2.484.491.375,00				2.646.160.018,00	161.668.643,00
5.1.1.001	Gaji dan Tunjangan				1.629.749.375,00				1.727.045.644,00	97.296.269,00
5.1.1.001.001	Gaji pokok PNS / uang representasi				1.347.669.130,00				1.341.142.584,00	93.473.454,00
	- Gol. I	1	org/pgw	31.212.848,00	31.212.848,00	1	org/pgw	31.067.598,00	31.067.598,00	(145.250,00) (0,47)
	- Gol. II	10	org/pgw	38.495.450,00	38.495.450,00	11	org/pgw	39.164.349,00	39.164.349,00	45.853.339,00 11,91
	- Gol. III	10	org/pgw	55.820.947,00	55.820.947,00	10	org/pgw	62.203.731,00	62.203.731,00	63.787.840,00 11,42
	- Gol. IV	4	org/pgw	68.308.078,00	273.232.312,00	3	org/pgw	85.743.279,00	257.229.837,00	(16.002.475,00) (5,66)
5.1.1.001.002	Tunjangan keluarga				135.788.590,00				144.136.860,00	8.348.280,00
	- Suami / Istri	22	org/pgw	4.970.438,00	109.349.636,00	22	org/pgw	5.329.842,00	117.256.524,00	7.906.688,00 7,23
	- Anak	28	org/pgw	944.248,00	26.438.944,00	27	org/pgw	995.568,00	28.890.338,00	441.392,03 1,87
5.1.1.001.003	Tunjangan jabatan				135.240.699,00				121.058.009,00	(14.199.690,00) (10,30)
	- Eselon II	1	org/pgw	26.633.500,00	26.633.500,00	1	org/pgw	26.325.000,00	26.325.000,00	(2.308.500,00) (0,06)
	- Eselon III	3	org/pgw	15.176.933,00	46.530.799,00	2	org/pgw	20.082.500,00	40.165.000,00	(5.345.799,00) (11,74)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal.: 2

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan			Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga				
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 + 6	12	
- Eselon IV		6	org/pgw	7.635.800,00	61.064.800,00	6	org/pgw	9.050.000,00	54.544.800,00	(5.544.800,00)	(10,71)	
5.1.1.001.005	Tunjangan fungsional umum:				33.159.300,00				38.738.636,60	5.578.336,60	16,32	
- Gol. I		1	org/pgw	2.474.500,00	2.474.500,00	1	org/pgw	2.450.000,00	2.450.000,00	(24.500,00)	(0,99)	
- Gol. II		10	org/pgw	2.545.200,00	25.452.000,00	11	org/pgw	2.450.455,00	26.955.005,00	1.503.005,00	5,91	
- Gol. III		2	org/pgw	2.615.900,00	5.231.800,00	3	org/pgw	2.603.875,00	7.811.625,00	2.579.825,00	49,31	
- Gol. IV					0,00	1	org/pgw	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	
5.1.1.001.006	Tunjangan beras				65.829.750,00				88.188.070,00	2.328.320,00	3,54	
- Tunjangan Beras		75	org/pgw	877.730,00	65.829.750,00	74	org/pgw	921.055,00	88.188.070,00	2.328.320,00	3,54	
5.1.1.001.007	Tunjangan PPH/tunjangan khusus				2.376.216,00				2.625.000,00	248.784,00	10,47	
- Tunj. PPh		16	org/pgw	132.012,00	2.376.216,00	25	org/pgw	105.000,00	2.625.000,00	248.784,00	10,47	
5.1.1.001.008	Pembulatan gaji				21.800,00				24.725,00	2.925,00	13,42	
- Pembulatan gaji		25	org/pgw	872,00	21.800,00	25	org/pgw	689,00	24.725,00	2.925,00	13,42	
5.1.1.001.021	Juran Jaminan Kewajiban kerja dan jaminan kematian				9.856.500,00				11.171.775,00	1.515.275,00	15,69	
- JKK		25	org/pgw	97.764,00	2.444.100,00	25	org/pgw	111.718,00	2.792.950,00	348.850,00	14,27	
- JKM		25	org/pgw	288.496,00	7.212.400,00	25	org/pgw	335.153,00	8.378.825,00	1.166.425,00	16,17	
5.1.1.002	Tambahan Penghasilan PNS				654.742.000,00				919.114.374,00	54.372.374,00	7,53	
5.1.1.002.001	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja				854.742.000,00				919.114.374,00	54.372.374,00	7,53	
TPP berdasarkan prestasi kerja (sd. Mei)			tahun		0,00		org/pgw		0,00	0,00	0,00	
STRUKTURAL :					0,00		tahun		0,00	0,00	0,00	
- Kelas Jabatan 14 : 1 org x 12 bln		12	org/pgw	6.068.000,00	79.992.000,00	org/pgw	6.068.000,00	0,00	(79.992.000,00)	(100,00)		
- Kelas Jabatan 12 : 1 org x 12 bln		12	org/pgw	4.708.000,00	56.490.000,00	org/pgw	4.708.000,00	0,00	(56.490.000,00)	(100,00)		
- Kelas Jabatan 11 : 3 org x 12 bln		36	org/pgw	4.499.000,00	161.964.000,00	org/pgw	4.499.000,00	0,00	(161.964.000,00)	(100,00)		
- Kelas Jabatan 9 : 2 org x 12 bln		24	org/pgw	3.201.000,00	76.824.000,00	org/pgw	3.201.000,00	0,00	(76.824.000,00)	(100,00)		
- Kelas Jabatan 8 : 7 org x 12 bln		84	org/pgw	2.904.000,00	243.936.000,00	org/pgw	2.904.000,00	0,00	(243.936.000,00)	(100,00)		
PELAJSANA :					0,00				0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)		%			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga		19 = 7 x 9	15 = 19 - 6				
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10	11	12				
- Kelas Jabatan 7 : 2 org x 12 bln	24	org/pgw	2.403.000,00	57.672.000,00		org/pgw	2.403.000,00	0,00	0,00	(57.672.000,00)	(100,00)				
- Kelas Jabatan 6 : 1 org x 12 bln	12	org/pgw	1.863.000,00	22.356.000,00		org/pgw	1.863.000,00	0,00	0,00	(22.356.000,00)	(100,00)				
- Kelas Jabatan 5 : 9 org x 12 bln	108	org/pgw	1.323.000,00	142.884.000,00		org/pgw	1.323.000,00	0,00	0,00	(142.884.000,00)	(100,00)				
- Kelas Jabatan 1 : 1 org x 12 bln	12	org/pgw	700.000,00	8.400.000,00		org/pgw	700.000,00	0,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)				
Kurang bayar tahun 2018						tahun	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	(4.218.000,00)	(100,00)				
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi s/d bulan Mei 2019	1	tahun	4.218.000,00	4.218.000,00		0,00	1	org/pgw	411.895.374,00	411.895.374,00	411.895.374,00	0,00			
- Ka. Badan						0,00	1	org/pgw	40.365.000,00	40.365.000,00	40.365.000,00	0,00			
- Sekretaris Badan						0,00	1	org/pgw	31.119.000,00	31.119.000,00	31.119.000,00	0,00			
- Ka. Bidang						0,00	3	org/pgw	29.049.000,00	87.147.000,00	87.147.000,00	0,00			
- Kasubag / Kasubid						0,00	9	org/pgw	21.252.000,00	191.285.000,00	191.285.000,00	0,00			
- Gol. IV						0,00	1	org/pgw	15.042.000,00	15.042.000,00	15.042.000,00	0,00			
- Gol. III						0,00	3	org/pgw	14.559.000,00	43.677.000,00	43.677.000,00	0,00			
- Gol. II						0,00	11	org/pgw	8.418.000,00	92.598.000,00	92.598.000,00	0,00			
- Gol. I						0,00	1	org/pgw	6.003.000,00	6.003.000,00	6.003.000,00	0,00			
Jumlah									2.484.491.375,00		2.846.160.018,00	151.688.643,00	6,51		
<b>Rencana Pendapatan per Triwulan</b>															
Triwulan I	621.122.842,00														
Triwulan II	670.699.100,00														
Triwulan III	638.877.450,00														
Triwulan IV	715.460.626,00														
Jumlah	2.640.160.018,00														

Lumajang, 02 September 2019



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA SKPD 2.2**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
Tahun Anggaran 2019**

Unsur Pemerintahan		1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Organisasi		1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan		Bertambah / Berkurang		
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10
01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b> 021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Dalam dan Luar Kabupaten	0,00	DAU	742.860.500,00	821.946.500,00	79.086.000,00	1.065,00	
02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b> 045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Satpol PP Kabupaten Lumajang	0,00	DAU	1.460.625.000,00	2.379.180.000,00	898.554.000,00	6.069,00	
06	046 Penelihuan Ruin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMASAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Satpol PP Kabupaten Lumajang	0,00	DAU	1.245.730.000,00	2.144.284.000,00	898.554.000,00	7.213,00	
07	002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP Kabupaten Lumajang	0,00	DAU	234.890.000,00	234.890.000,00	0,00	0,00	
08	003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Satpol PP Kabupaten Lumajang	0,00	DAU	10.084.000,00	23.384.009,60	13.300.000,00	13.119,00	
09	007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Dalam dan Luar Kab. Lumajang	0,00	DAU	2.477.000,00	2.477.000,00	0,00	0,00	
15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b> 005 Pengendalian Keamanan	Kab. Lumajang	0,00	DAU	844.405.000,00	844.405.000,00	0,00	0,00	
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG									

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Transaksi		Bertambah / Berkurang	
					Sebelum Perubahan	Selisih Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-7	9
22	013 Lintungan Pengamanan Sezenik oleh Satuan Linmas	Kab. Lumajang	0,00	DAU	683.550.000,00	683.550.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIDAK UMRU				7.321.046.000,00	7.888.305.000,00	167.260.000,00	502,00
	001 Operasi dan Pengesalian Keamanan dan Ketertidak Umum	Kab. Lumajang	0,00	DAU	3.505.460.000,00	3.243.360.000,00	(262.000.000,00)	(747,00)
23	002 Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja	Dalam dan Luar Kabupaten	0,00	DAU	120.335.000,00	138.335.000,00	0,00	0,00
	003 Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertidak Umum antara Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI/Kejaksaan	Kab. Lumajang	0,00	DAU	3.678.350.000,00	4.308.110.000,00	629.260.000,00	1.710,00
	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN				420.105.500,00	420.105.500,00	0,00	0,00
24	011 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kab. Lumajang	0,00	DAU	420.105.500,00	420.105.500,00	0,00	0,00
	PROGRAM PENEGERAKAN PRODUK HUKUM DAERAH				292.074.000,00	292.674.000,00	0,00	0,00
	001 Penyuluhan Nasional dalam Pemahaman Produk Hukum Daerah	Kab. Lumajang	0,00	DAU	112.631.000,00	173.881.000,00	61.250.000,00	5.438,00
25	002 Pembinaan dan Pengawasan dalam Penerapan Produk Hukum Daerah	Kab. Lumajang	0,00	DAU	95.523.000,00	88.523.000,00	0,00	0,00
	003 Penyelidikan dan Pencidikan dalam Penerapan Produk Hukum Daerah	Kab. Lumajang	0,00	DAU	82.920.000,00	31.670.000,00	(61.250.000,00)	(6.592,00)
	Jumlah				11.111.200.000,00	12.468.400.000,00	1.358.200.000,00	1.222,00

Lumajang, 02 September 2019



# **RENCANA KINERJA (RENJA)**

## **TAHUN 2019**

**BUDGET RENCANA KINERJA  
( RENJA K )  
BADAN KESATUAN HANSA DAN POLITIK KABUPATEN LIMAJANG  
TAHUN 2019**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	No	KEDAIKAN	No	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	DODIMATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)	No	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L.	Meningkatkan Inovativitas wilayah	Peningkatan masalah strategis yang berdayakan wilayah di bidang (Politik, sosial dan ekonomi)	Meningkatnya kesadaran dan keayamanan kejadian urusan ipolitik,sosial dan ekonomi	1. Peningkatan kesadaran dari masyarakat terhadap masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan keterritoriun.	1.1.	Rajuan Masa Depan Strategis	1.1.1. Meningkatnya kesadaran strategis	Bentah potensi masalah strategis	1322 Porsesi marakat	934.660.000	1.1.1. Pembinaan Wilayah	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah politik,sosial dan ekonomi	Jumlah SKD yang terlibat dalam program dan kegiatan PUSKESMAS	50 SKD	322.125.000				
				2. Peningkatan pengembangan nilai-nilai kearifan bangsa	1.1.2.	Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Bangsa	Meningkatnya pengembangan nilai nilai kearifan bangsa	Peningkatan capaian pengembangan nilai nilai kearifan bangsa	33.30%	376.861.000	1.2.1. Pembinaan Negara	Meningkatnya pembinaan negara	Jumlah fasilitas deteksi dan cegak dan tertib permasalahan PUSKESMAS	12 Fasilitas	612.535.000				
				3. Peningkatan hubungan antar lembaga	1.2.2.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan					1.2.2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah fasilitas peningkatan adat istiqlal Islam Negeri	9 Fasilitas					
				4. Peningkatan ketelaahung keamanan bangsa dan politik	2.1.	Keluarga Bersama	Meningkatnya keluarga antar lembaga	Peningkatan capaian lembaga-lembaga daerah dan lembaga-lembaga nasyonal yang dibina dan diellisitasi	8,20%	252.673.000	1.3.1. Pembinaan dan Pendidikan Lembaga - Lembaga Daerah	Meningkatnya pembinaan dan pendidikan lembaga daerah	Jumlah keluarga lembaga-lembaga daerah	9 Lembaga daerah					
					2.1.1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mediatorisasi Pembinaan terhadap keamanan administrasi perkantoran	Peningkatan pembinaan pelajaran administrasi dan operasional perkantoran	100%	747.500.000	1.3.2. Pembinaan dan Pendidikan Lembaga - Lembaga Nasyonal Kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan dan pendidikan lembaga - lembaga nasyonal kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang terlibat dalam lembaga	7 Organisasi					
														Jumlah organisasi yang menyalurkan pembinaan dan pendidikan	500 peratus	34.370.000			
														Jumlah Ormas / USM yang terfasilitasi oleh lembaga nasyonal	176 Organisasi	167.700.000			
														Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	26 jenis	747.500.000			

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	No	DETAIJAHAN	No	PROGRAM					No	KEGIATAN					KET			
								DRAJAH PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	ANGGARAN (Rp)		DETAIJAHAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							2.2.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pengetahuan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	3.035.000	2.2.1	Pembangunan/ Pengadaan dan Riwayat Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pengetahuan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	5 jenis	175.500.000						
							2.2.2	Peningkatan Bantuan dan Penilaian Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya penilaian penilaian Bantuan dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparat yang dilayani	9 jenis	215.535.000										
							2.3	Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian pelaporan kinerja dan keuangan yang akuratibel	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akuratibel	5 jenis	4.065.000	2.3.1	Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Bentuk Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Meningkatnya penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Bentuk Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang dilayani SKPD / LAKIP	2 jenis (24 Eksemplar)	1.665.000				
													2.3.2	Penyelesaian Laporan Indeks Kepatuhan Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian Laporan Indeks Kepatuhan Masyarakat	Jumlah laporan Indeks Kepatuhan Masyarakat yang akuratibel	2 jenis (6 Eksemplar)	1.000.000				
								JUMLAH				2.707.000.500						2.707.000.000				

Lembaran: 24 Jenui 2019



# **RENCANA STRATEGIS (RENTRA)**

**TAHUN 2018 - 2023**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

**VISI** : Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, dan Bermartabat  
**MISI** : Penuhi kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	Target				
						Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1 Meningkatnya kondisifitas wilayah	Persentase masalah strategis yang ditanganai terkait Ipolyeksbud dan Tibmas			Jumlah Konflik Terkait Ipolyeksbud dan Tibmas yang Telah Dikasi	%	100	100	100	100	100
				Jumlah Konflik Terkait Ipolyeksbud dan Tibmas yang ada						
			Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyeksbud	Jumlah kajian terkait keamanan dan kenyamanan wilayah di bidang Ipolyeksbud	Kajian	1	2	3	4	4



BAHAGIAN RENCANA STRATEGIK 2019-2023

: Pengetahuan Matematik Yang Diperlukan Mahasiswa dan Bernasibah  
: Pengetahuan Matematik yang diperlukan mahasiswa matematik sains teknik selainlah

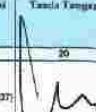
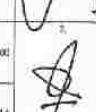
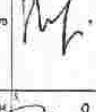
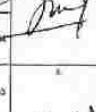
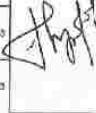
STRATEGI	AKTIVITAS	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Kriteria dan Kegiatan (Output))	Status	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan	Target Akhir Program dan Kegiatan Pendukung										Mandat Kinerja pada akhir periode Realisasi (SOP)	LOKASI				
							2017					2018					2019					
							Tarif	Rp	Tarif	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target					
Menyajikan informasi terstruktur untuk meningkatkan kinerja organisasi	Peningkatan kinerja organisasi berdasarkan standart	1.00.01.11.	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Pagu Indikatif Program:				Rp 200.000.000,00		Rp 150.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 1.412.310.000,00	KECAMATAN			
				Output dan Program:	%		12		13		13,5		10,2		10,5		10,5		10,5			
	Penilaian dan pelatihan Lembaga Lembaran Dalam	1.00.02.10.001	Penilaian dan pelatihan Lembaga Lembaran Dalam	Pagu Indikatif Kegiatan:				Rp 64.000.000,00		Rp 112.370.000,00		Rp 173.310.000,00		Rp 121.220.000,00		Rp 147.320.000,00		Rp 184.000.000,00	WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG			
				Input : Tersedianya data Output Kegiatan:																		
				Jumlah pelaku lembaga - lembaga dalam operasionalnya adalah 100% (100%) dan berada di bawah standar	Kinerja	Standart	10		10		10		10		10		10		10			
	Penilaian dan pelatihan Lembaga Lembaran Dalam Kesiapan mendekati	1.00.02.10.002	Penilaian dan pelatihan Lembaga Lembaran Dalam Kesiapan mendekati	Pagu Indikatif Kegiatan:				Rp 107.700.000,00		Rp 146.000.000,00		Rp 150.000.000,00		Rp 182.000.000,00		Rp 182.000.000,00		Rp 318.400.000,00	WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG			
				Input : Tersedianya data Output Kegiatan:																		
				Jumlah Organ yang berlabuh di dalam dan luar negeri yang berlabuh di dalam dan luar negeri	Organisasi	Organisasi	7		7		7		7		7		7		7			
	Penilaian dan pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan daerah	1.00.02.10.004	PELAYANAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN	Pagu Indikatif Program:				Rp 293.826.900,00		Rp 112.834.800,00		Rp 808.824.900,00		Rp 808.824.900,00		Rp 1.808.824.900,00		Rp 4.472.180.000,00	BAKESBANDPOL KAB. LUMAJANG			
				Persebaran pengetahuan pelaksanaan program dan kegiatan	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
				Output Kegiatan:				Rp 145.000.000,00		Rp 73.034.000,00		Rp 150.034.000,00		Rp 160.834.000,00		Rp 160.834.000,00		Rp 1.003.624.000,00		Rp 4.472.180.000,00		

STRATEGI	KOGRAJAHAN	KODE	PROGRAM / INISIATIF	Tujuan / Kunci Program Golongan dan Kegiatus (Subjek)	Satuan	Dana Cerdas pada Tahun Ajaran Persempit	Target Kunci Program dan Kegiatus Pendukung										Pendek Aritage pada tahun pendidikan Nasional DRPS		
							2021					2022					2023		
							Anggaran	Rp	Anggaran	Rp	Anggaran	Rp	Anggaran	Rp	Anggaran	Rp	Anggaran	Rp	
1.	1.	1.	1.38.01.01	PENGEMBANGAN SARDANA CARA PERUBAHAN APARATUR	Pagu Indikatif Program:		Rp 189.301.691,60		Rp 191.800.000,00		Rp 219.922.000,00		Rp 281.911.900,00		Rp 351.848.000,00		Rp 1.416.286.000,00		
				Outcomes Program:															
				Penerapan peraturan behavor kesehatan manusia dan lingkungan sekitar	%	100	100		100		100		100		100		100		
	1.05.02.02.640		Peningkatan Pengembangan dan Kebutuhan Sumber dan Prasarana Akademik	Pagu Indikatif Kegiatan:		Rp 398.110.000,00		Rp 176.300.000,00		Rp 16.300.000,00		Rp 17.500.000,00		Rp 41.720.000,00		Rp 42.300.000,00		Rp 48.250.000,00	
				Input : Tenaga ahli															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah individu sumber dan prasarana akademik	Jenis	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	1.05.02.02.640		Penyelenggaraan Rujukan Sumber dan Prasarana Akademik	Pagu Indikatif Kegiatan:		Rp 255.171.000,00		Rp 114.300.000,00		Rp 223.000.000,00		Rp 211.321.000,00		Rp 24.700.000,00		Rp 25.340.000,00		Rp 1.177.360.000,00	
				Input : Tenaga ahli															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah sumber dan prasarana akademik yang diperlukan	Jenis	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	40	
	1.05.02.02.640		PERENCANAAN PERKEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KELUARAN	Pagu Indikatif Program:			Rp 4.450.200,00		Rp 21.600.000,00		Rp 31.945.200,00		Rp 34.950.000,00		Rp 36.198.000,00		Rp 38.123.000,00		
				Outcomes Program:															
				Jumlah program literasi dan kewirausahaan yang dijalankan	Jenis	S	E (10 Example)		O (70 Example)		O (70 Example)		O (70 Example)		O (70 Example)		20.000 Example		
	1.05.02.02.640		Penerapan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Kinerja SOP/TKP/KAJIP	Pagu Indikatif Kegiatan:			Rp 1.092.020,00		Rp 2.015.000,00		Rp 2.096.000,00		Rp 2.155.000,00		Rp 3.651.000,00		Rp 12.239.600,00		
				Input : Tenaga ahli															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja metrik yang ada dalam SOP/TKP/KAJIP yang dijalankan	Jenis	A	2	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	2 (2 Example)	
	1.05.02.02.640		Perbaikan Laporan Indeks Kinerja dan Kinerja	Pagu Indikatif Kegiatan:			Rp 3.600.000,00		Rp 3.060.000,00		Rp 3.000.000,00		Rp 4.500.000,00		Rp 5.360.000,00		Rp 20.386.000,00		
				Input : Tenaga ahli															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah laporan indeks kinerja dan kinerja yang dijalankan	Jenis	R	2 (2 Example)		2 (2 Example)		2 (2 Example)		2 (2 Example)		2 (2 Example)		2 (2 Example)		
	1.05.02.02.640		Penerapan Rencana Kajip dan Assesmen (TKP/KAJIP)	Pagu Indikatif Kegiatan:					Rp 18.000.000,00		Rp 18.900.000,00		Rp 17.800.000,00		Rp 17.500.000,00		Rp 17.350.000,00		
				Input : Tenaga ahli															
				Output Kegiatan:															
				Jumlah sumber dan prasarana yang diperlukan	Jenis	R	0	0	0 (0 Example)		1 (10 Example)		1 (10 Example)		1 (10 Example)		1 (10 Example)		
	1.05.02.02.640						Rp 2.811.500.000,00		Rp 2.100.000.000,00		Rp 2.388.000.000,00		Rp 3.400.000.000,00		Rp 2.542.010.000,00		Rp 6.020.170.000,00		



**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU INTERIM  
TAHUN 2019**

**PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU INTERIM  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2019**

No.	JABATAN	Unitid / Proyeksi dan Kegiatan	Bantuan	Inisiatif Kinerja Progres (Kwintut) & Kepaten (Kutut)	Permutu Indikator	Status	Target PK	Realisasi Tahun 2019		Capaian Skripsi (%)	Target Akhir RKPWd	Realisasi		Kinerja Kewajiban			Capaian Kewajiban	Efisiensi	Tanda Tangan	
								Pembangunan	Realisasi			2017	2018	Kode program/kegiatan	Anggaran	Ressensi				
1	Kabid. Kajian Masalah Strategis	Kajian Masalah Strategis	Meningkatnya kajian masalah strategis	Jumlah potensi masalah strategis	Jumlah potensi masalah strategis	Potensi Masalah	1.323	1.323	260	19,85	674	-	-	02.31	Rp 934.850.000	Rp 84.502.500	88,92	(78,37)		
2	Kasubb. Pembinaan Wilayah	Pembinaan Wilayah	Meningkatnya kewaspadaan permasalahan bera wilayah	Jumlah SKD yang terindikasi tentang pengamanan kreditur (POLERSOBUD)	Jumlah SKD yang terindikasi tentang pengamanan kreditur (POLERSOBUD)	SKD	50	50	50	100,00	259	-	-	02.31.001	Rp 322.120.000	Rp 52.122.500	100,00	0,00		
3	Kasubb. POLERSOBUD	Peningkatan Misi, Politik, Etikos, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya wawasan dan pemahaman dalam politik, etikos, sosial, dan budaya	Jumlah hasil desakati dan negosi di berbagai permasalahan (POLERSOBUD)	Jumlah hasil desakati dan negosi di berbagai permasalahan (POLERSOBUD)	Fasilitasi	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	-	-	02.31.002	Rp 810.355.000	Rp 802.440.000	98,25	1,68		
				Jumlah fasilitasi pengamanan tetap	Jumlah fasilitasi pengamanan tetap	Fasilitasi	170,00	170,00	645,00	516,41	210,00	-	-	02.31.003	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	100,00	40,08		
				Jumlah fasilitasi pemantauan okirg sang	Jumlah fasilitasi pemantauan okirg sang	Fasilitasi	2,00	2,00	2,00	100,00	10,00	-	-	02.31.004	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100,00	1,05		
4	Kabid. Pengembangan Misi - nilai Kesehatan Bangsa	PENGEMBANGAN MISI - nilai Kesehatan Bangsa	Meningkatnya pengembangan misi - nilai kesatuan bangsa	Jumlah kesadaran terhadap dalam kerukunan umat beragama	Jumlah kesadaran terhadap dalam kerukunan umat beragama X 100		5%	33,33	33,33	33,34	100,03	90,48	-	-	02.32	Rp 376.001.000	Rp 363.042.000	98,00	3,70	
5	Kasubb. Bina Negara	Pembinaan Bina Negara	Meningkatnya pembinaan bina negara	Jumlah kesadaran pentingnya nilai-nilai bina negara	Jumlah kesadaran pentingnya nilai-nilai bina negara	Fasilitasi	0,00	0,00	0,00	100,00	15,00	-	-	02.32.001	Rp 223.881.000	Rp 283.458.000	100,00	4,84		
6	Kasubb. Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kesadaran terhadap dalam kerukunan umat beragama	Jumlah kesadaran terhadap dalam kerukunan umat beragama	Kesadaran	5,00	5,00	5,00	100,00	13,00	-	-	02.33.003	Rp 100.120.000	Rp 89.587.000	90,47	0,55		
				Jumlah kesadaran terhadap dalam kerukunan suku, budaya dan ras	Jumlah kesadaran terhadap dalam kerukunan suku, budaya dan ras	Kesadaran	2,00	2,00	2,00	100,00	8,00	-	-	02.33.004	Rp 100.120.000	Rp 89.587.000	90,47	0,55		
				Jumlah rasa yang terdapat dalam kesadaran kebangsaan	Jumlah rasa yang terdapat dalam kesadaran kebangsaan	Rasa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	4.000,00	-	-	02.33.005	Rp 100.120.000	Rp 89.587.000	90,47	0,55		

No.	JABATAN	Unesco / Program dan Kegiatan	Bentuk	Inisiatif Kerja Program (Indikator) & Kegiatan (output)	Pomona Indikator	Rasian	Target ITC	Bilangan Tahun 2019		Capaian Kerja (%)	Target Akhir RPVSI	Indikasi		Kinerja Keuangan			Capaian Keuangan	Efisiensi	Tujuan Tinggi
								Pembangunan	Rendam			2017	2018	Kode program/Kegiatan	Anggaran	Rendam			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Kabid. Hubungan Antar Lembaga	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	berikan hubungan antar lembaga	Persentase capaikan kerjasama dengan lembaga dan kerjanya yang ditetapkan yang ditetapkan dan dilaksanai	Jumlah kerja - kerjasama dengan lembaga dan kerjanya yang ditetapkan dan dilaksanai X 100	%	8,29	8,25	9,59	116,48	10,00	-	-	02.33	Rp. 252.070.000	Rp. 250.720.000	10,46	17,00	
8	Kabid. Lembaga Kerajaan Daerah	Pembinaan dan kewibawaan Lembaga Lembaga Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan kewibawaan Lembaga Lembaga Daerah	Jumlah hasilkasi kerja - kerja antara daerah	Jumlah hasilkasi kerja - kerja daerah	Lemaga Daerah	9,00	9,00	12,00	103,33	15,00	-	-	02.33.001	Rp. 24.310.000	Rp. 23.020.000	9,40	34,65	
9	Kabid. Lembaga Kerajaan Daerah	Pembinaan dan kewibawaan Lembaga Lembaga Kerajaan Daerah	Meningkatnya Pembinaan dan kewibawaan Lembaga Lembaga Kerajaan Daerah	Jumlah Ormas yang berhasil dikenal	Jumlah Ormas yang berhasil dikenal	Organasi	7,00	7,00	10,00	142,86	7,00	-	-	02.33.002	Rp. 167.700.000	Rp. 167.700.000	10,00	42,65	
10	Sekretaris	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pemerintahan terhadap kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase pemerintah keturunan pelajaran administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah pemerintah keturunan pelajaran administrasi dan operasional yang berhasil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	02.01	Rp. 747.580.000	Rp. 712.315.100	95,25	4,72	
11	Kasupag. Keuangan	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Meningkatnya Pelajaran administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran tersebut	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional tertentu	Jenis	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	-	-	02.01.021	Rp. 747.580.000	Rp. 712.315.100	95,25	4,72	
12	Sekretaris	PEMINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang berhasil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	02.02	Rp. 391.020.000	Rp. 386.580.450	99,37	0,65	
13	Kasupag. Umum	Pembangunan / Pengadaan dan Renovasi / Sistemi dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung, peralatan dan perlengkapan yang wajib fungsi	Jumlah ketiduran sarana dan prasarana operasi	Jumlah ketiduran sarana dan prasarana operasi	Jenis	5,00	5,00	4,00	80,00	5,00	-	-	02.02.045	Rp. 175.500.000	Rp. 173.791.000	98,99	18,00	

No.	JABATAN	Uraian Program dan Kegiatan	Batasan :	Indikator Kinerja Progres (Indikator & Kriteria Kinerja)	Perencanaan Kinerja	Status	Target PSC	Klasifikasi Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJM	Penilaian		Kriteria Kewajiban			Capaian Keuangan	Efisiensi	Tanda Tangan		
								Perkiraan	Realistik			2017	2018	Kode program/Kegiatan	Anggaran	Realistik					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
14	Kasubag. Umum	Penetapanan Ratin Berbasis Sensus dan Persebaran Apabatur	Meningkatnya tingkat Persebaran dan Penetrasi dan Presensi dan Presensi Apabatur	Jumlah sensus dan presensi apabatur yang dilakukan	Jumlah sensus dan presensi apabatur yang dilakukan	Jenis	0,00	0,00	0,00	100,00	8,00	-	-	02.02.004	Rp. 215.539.000	Rp. 214.854.456	99,65	0,32			
15	Balektuan	PENINGKATAN PENGETAHUAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kesiapan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan teliti	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan teliti	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan teliti	Jenis	5 (25 Eksampel)	5 (25 Eksampel)	5 (25 Eksampel)	100,00	6 (75 Eksampel)	-	-	02.02.004	Rp. 4.600.000	Rp. 4.687.356	99,65	0,15			
16	Kasubag. Kesepeleman	Penyalinan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realitas Kinerja SKPD/LAKP	Meningkatnya Penyalinan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realitas Kinerja SKPD/LAKP	Jumlah laporan capaian kinerja dan indeks realitas kinerja SKPD/LAKP yang akurat dan teliti	Jumlah laporan capaian kinerja dan indeks realitas kinerja SKPD/LAKP yang akurat dan teliti	Jenis	3 (32 Eksampel)	3 (32 Eksampel)	3 (32 Eksampel)	100,00	3 (32 Eksampel)	-	-	02.02.201	Rp. 1.605.000	Rp. 1.607.955	99,58	0,42			
17	Kasubag. Kesepeleman	Penyalinan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penyalinan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat yang akurat dan teliti	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat yang akurat dan teliti	Jenis	2 (8 Eksampel)	2 (8 Eksampel)	2 (8 Eksampel)	100,00	2 (8 Eksampel)	-	-	02.02.006	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	100,00	-			
JUMLAH-										114,20							Rp. 3.707.000.000	Rp. 2.647.203.000	70,97	16,61	



Jumatang, 07 Januari 2019

REPUBLIK INDONESIA DAN POLITIK

PROVINSI LUMAJANG

LUMAJANG

PERDA

NIP 19620727199512 100

KESESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

# **PENGUKURAN PENCAPAIAN TUJUAN INTERIM**

## **TAHUN 2019**

**PENGUKURAN PENCAPAIAN TUJUAN INTERIM TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

No	TUJUAN			Ratian	Realisasi Tahun 2019			Capaian Kinerja BPJM	Target Akhir BPJM	Realisasi		Kinerja Keuangan			Capaian Keuangan	Efisiensi	
	Urutan	Indikator Kinerja	Rumusan Formula		Tarief PK	Perhitungan	Realasi			2017	2018	Kode program	Anggaran	Realisasi			
1	Meningkatkan kondiditas waliyat	Persentase masalah sengsi yang ditangani berdasarkan tindakan dan timbul	Jumlah kontak terbatas (telephon dan Tobras yang dilangan) Jumlah kontak terbatas (telephon dan Tobras yang ada)	%	100	100	100	100	100	-	-	1.05.02	2.707.000.000	2.643.903.000	97,57	2,00	
		JUMLAH					100						2.707.000.000	2.643.903.000	-	97,57	2,00

Lamongan, 7 Januari 2019.



# **PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN INTERIM**

## **TAHUN 2019**

**PENGKURAH PENCAPAIAN SASARAN INTERIM TAHUN 2019**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

No	Urutan	Indikator Sasarj	Rumusan Formula	Satuan	Target PK	Realisasi Tahun 2019		Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi		Minerva Kinerja		Capaian Kesiangan	Efisiensi	
						Perhitungan	Realistik			2017	2018	Kode program	Anggaran	Realisasi		
1	Meningkatnya pertumbuhan dan kenyamanan warga di lingkung nya	Jumlah keluarga terikat kriminan dan kejahatan wilayah di lingkung ipotek rumah jasa amanat wilayah di tingkat ipotek rumah jasa amanat wilayah	Jumlah keluarga terikat kriminan dan kejahatan wilayah di tingkat ipotek rumah jasa amanat wilayah di tingkat ipotek rumah jasa amanat wilayah	Rajah	1	1	1	100	4	-	-	1.053.02	2.707.030.000	2.612.903.000	97,97	2,21
			JUMLAH					100					2.707.030.000	2.612.903.000	97,97	2,21



# **SURAT PERNYATAAN**

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu laporan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang untuk tahun anggaran 2019 / tribulan IV sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja sepenuhnya menjadi tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendala informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lumajang, 9 Januari 2020

KETUA TIM SAKIP  
BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG

  
Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM  
NIP. 19670604 199302 1 001

LAIN

LAIN

**DATA CAPAIAN IKU BUPATI TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus/Formula Perhitungan Atas IKU	Target Tahun 2019 (Mengacu ke dokumen RPJMD 2018 – 2023)	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019	
					Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	Jumlah konflik terkait Ipoleksosbud dan Tibmas yang ditangani X 100	100%	100%	100%
			Jumlah konflik terkait Ipoleksosbud dan Tibmas yang ada			

Hambatan dan Kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dalam Pencapaian IKU Bupati :

1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan tupoksi
2. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi
3. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal
4. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.
5. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum maksimal
6. Peraturan perundang- undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala / strategis yang dilakukan untuk mencapai target kinerja :

1. Dengan keterbatasan Sumber daya serta penempatan Pegawai Bakesbangpol yang tidak sesuai maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai langkah strategis Yakni dengan pelibatan Unsur-unsur pembantu kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperhi Halnya FKDM, FKUB, FPK serta Ormas dan LSM.
2. Dengan belum optimalnya pelatihan yang substantif maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan Bimtek terkait sistem Informasi yang termanajemen dengan baik seperti Halnya Bimtek Intelijen dengan melibatkan unsur dan jajaran samping.
3. Dengan perubahan Gaya Hidup Masyarakat saat ini dengan pengaruh perkembangan Tekhnologi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mempunyai rencana bekerja sama dengan Unsur terkait dalam Akses kemajuan teknologi, informatika, dan komunikasi sebagai pelestari dan pengembang nilai-nilai budaya lokal serta menggiring demokratisasi di Masyarakat sehingga memunculkan Jati diri daerah tertanam dijiwa masyarakat, serta terus meningkatkan nilai-nilai keagamaaan. Dalam hal ini, media sangat berperan besar dalam proses sosialisasi kepada masyarakat.
4. Dengan Minimnya anggaran membawa dampak tersendiri dalam Organisasi, Hal ini dapat diatasi dengan sering berkoordinasinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dengan unsur terkait dalam permasalahan-permasalahan yang muncul di Wilayah
5. Dengan Tidak konsistensi perundang-undangan serta tumpang tindihnya peraturan pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan unsur terkait seperti halnya Bagian Hukum Setda Lumajang dalam perumusan-perumusan keputusan Bupati yang akan dibuat.

Lumajang, 10 Januari 2020

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. BASUNI

NIP. 19820727 198512 1 001

**PROGRAM DAN ANGGARAN TA. 2019 YANG MENDUKUNG SASARAN IKU BUPATI  
TAHUN 2019**

No.	Nomenklatur Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kajian Masalah Strategis	Rp. 934.660.000	Rp. 924.562.500	98,92%

Lumajang, 10 Januari 2020

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG







## KAJIAN TAHUN 2019



### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Arif Rahman Hakim Nomor 01 Lumajang Telp. (0334) 881586  
E-mail : [kesbangpol@lumajangkab.go.id](mailto:kesbangpol@lumajangkab.go.id)  
LUMAJANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Kajian Ipolesosbud Trantibum pada Bidang Kajian Masalah Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang ini dapat diselesaikan. Kajian Ipolesosbud Trantibum ini menyajikan Rekomendasi dalam rangka kondusifitas wilayah Kabupaten Lumajang.

Penyusunan Kajian Ipolesosbud Trantibum didasarkan pada analisis terhadap dinamika permasalahan yang muncul di Kabupaten Lumajang serta masukan yang cerdas, inovatif dan visioner dari stakeholders. Landasan penyusunan Kajian Ipolesosbud Trantibum ini adalah dengan memperhatikan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai bagian integral dari unsur pelaksana ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk itulah Kajian Ipolesosbud dan Trantibum ini perlu disusun sesuai dengan kondisi terkini dan proyeksi masa depan yang menjadi tanggung jawab program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang. Semoga Kajian Ipolesosbud Trantibum ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk menjadi Lumajang menjadi Hebat dan bermartabat.

Ucapan terima kasih juga perlu kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Lumajang yang telah dan selalu memfasilitasi semua kebutuhan dan kegiatan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang dalam mencari,menangkap,mengumpulkan serta menganalisa dan membahas segala aspek kehidupan Masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang berharap penyampaian rekomendasi ini setidaknya dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang demi stabilitas dan kondusifitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## DAFTAR ISI

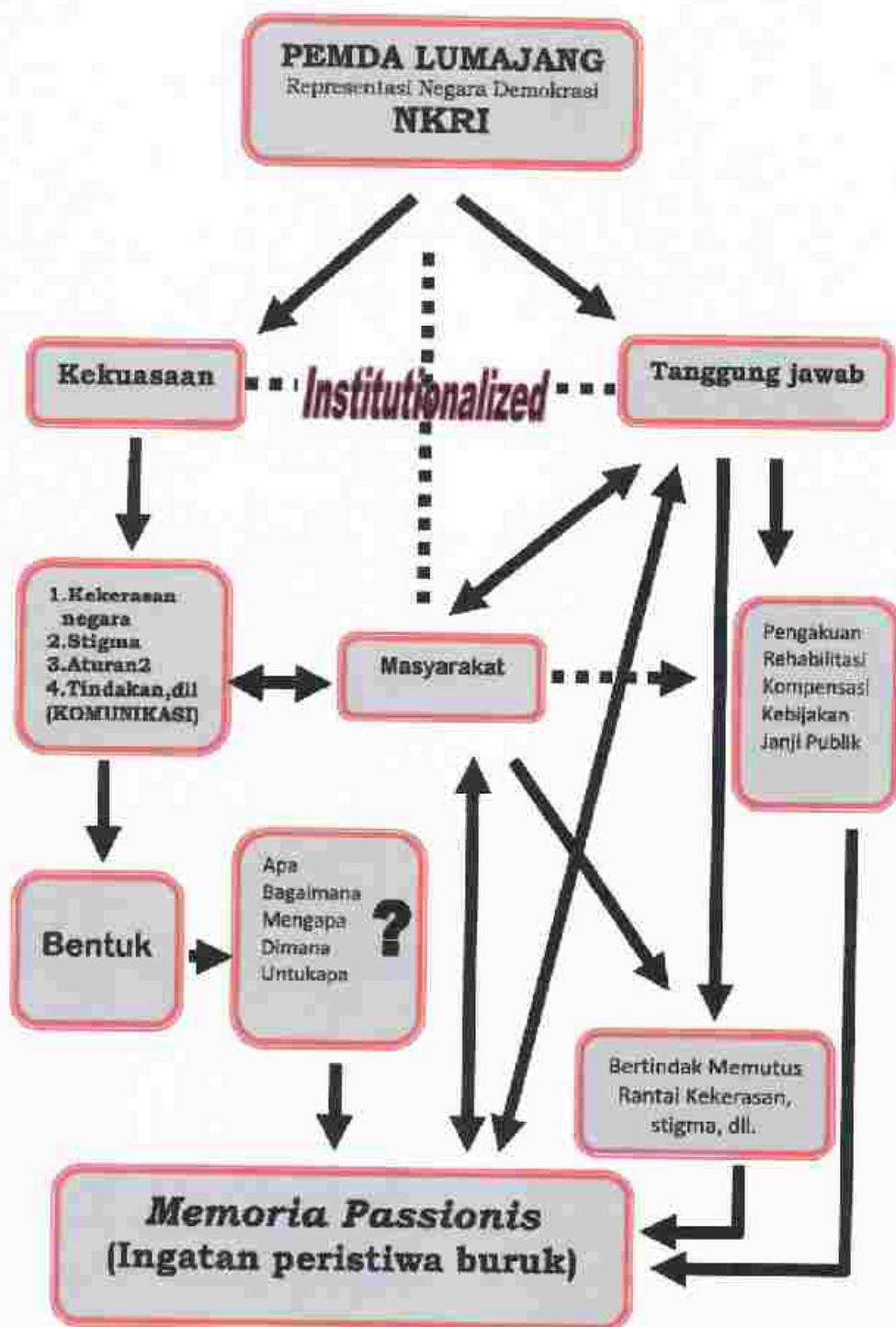
Halaman

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I GAMBARAN UMUM.....	1
II LATAR BELAKANG.....	3
III POKOK PERMASALAHAN DAN BAHASAN .....	4
A. IDEOLOGI.....	4
B. POLITIK .....	4
C. EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.....	10
IV PENUTUP.....	13

## I. GAMBARAN UMUM

### ALUR PIKIR

#### ALUR PIKIR REPRESENTASI NEGARA DEMOKRASI PEMERINTAH DAERAH KAB.LUMAJANG



- I. Bahwa suatu Negara, yang dipresentasikan pemerintah Kabupaten Lumajang pasti memiliki suatu alat legitimasi untuk mengukuhkan posisi atau kedudukannya. Alat legitimasi tersebut adalah kekuasaan. Dari legitimasi kekuasaan yang dimiliki tersebut , maka berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul dan diembanya, artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab berdasar keinginan warga masyarakat yang memberinya mandate untuk menjalankan system atau roda pemerintahan. Pada sisi lain , Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warganya terutama Hak Dasar atau Hak asasi yang menjadi milik setiap Individu.(Kajian: Plato,Thomas Hobbes, Nicolo Machiavelli).
- II. Bahwa kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lumajang dijalankan oleh aparatur Pemerintah yang sudah terpilih dan ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat yang diterimanya. Dalam kekuasaan ada aksi, seperti kekerasan, stigma, aturan-aturan, tindakan, dll. Namun kekuasaan harus merangkum bentuk aksi yang berbeda, menjadi aksi yang harmonis dan membutuhkan komunikasi, yaitu aksi yang komunikatif (Kajian: Hannah Arendt "*The Origins of Totalitarianism*").
- III. Bahwa basis struktur adalah pondasi yang diatasnya berdiri dua fakta, yaitu unsur super struktur: politico-legal (hukum dan negara) dan ideologi (agama, etika, politik, legal, dll). Sedang determinan utama yang menentukan kedua fakta super struktur adalah basis struktur yaitu proses produksi. Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki kekuasaan untuk meregulasi dan menindak setiap warga Negara yang melanggar regulasi tersebut. Kekuasaan untuk meregulasi dan menindak diistilahkan Repressive State Apparatus (RSA). Represif merupakan aparatur Negara yang menjalankan fungsinya: Fisik (keras) dan atau Non Fisik (administratif). RSA terdiri dari: pemerintahan, polisi, tentara, birokrasi, pengadilan, penjara, dll. Selain RSA, ada konsep Ideological State Apparatus (ISA) yang menjalankan fungsinya dengan ideologi, misalnya: keagamaan, keluarga, pendidikan, hukum, politik (system politik, parpol), serikat buruh, komunikasi (pers), kesusastraan, budaya, seni, olah raga, dll. (Kajian: Louis Pierre Althusser).

## II. LATAR BELAKANG

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bab I Pasal 22, celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah, Bab V tentang pendapatan asli daerah pasal 7, dalam upaya meningkatkan PAD dilarang :
  - a. Menetapkan peraturan daerah yang ekonomi biaya tinggi dan ;
  - b. Menetapkan aturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk,lalulintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor,Bab VI dana perimbangan pusat 11 ayat 3,dana bagi hasil yang bersumber dari SDA sebagaimana ayat 1 berasal dari :
    - Kehutanan
    - Pertambangan umum
    - Perikanan
    - Pertambangan minyak Bumi
    - Pertambangan Gas Bumi
    - Pertambangan Panas Bumi
4. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati tetap di presentasikan sebagai Kepala Daerah maupun Kepala Pemerintahan, hal ini dimaknai bahwa Bupati (Bupati Lumajang) bertanggung jawab atas stabilitas keamanan dan trantibmas serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017, tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan menteri dalam Negeri No.2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di Daerah;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang;
9. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188/315/427.12/2019 tentang Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Lumajang;
10. Bahwa wilayah Kabupaten Lumajang berdasarkan perundang-undangan yang ada merupakan wilayah bagian NKRI yang dalam segala aspek kehidupan Masyarakatnya berharap besar akan situasi dan kondisi aman, nyaman, terkendali, rukun dan damai;
11. Untuk dapat terwujudnya wilayah yang kondusif mutlak diperlukan adanya sinergitas yang harmonis, antara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang satu sama lain memiliki etik dan cara sendiri-sendiri.

### III. POKOK PERMASALAHAN DAN BAHASAN

#### A. IDIOLOGI

Kondisi sekarang bangsa Indonesia sedang dalam ujian dalam mempertahankan dan memperkuat Ideologi Pancasila. Adanya tekanan dan gesekan yang menginginkan adanya pergeseran Ideologi dasar Bangsa Indonesia saat ini membuat kekhawatiran yang sangat besar. Oleh karena itulah kedudukan kalangan mahasiswa dalam lingkungan masyarakat sangat diperlukan dan sangat berperan penting untuk menghindarkan pengikisan terhadap Ideologi Pancasila.

Adapun mengenai peran yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara, antara lain :

- Upaya untuk membudayakan semangat Wawasan Kebangsaan dengan Pengamalan Nilai – nilai luhur Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika terus dilakukan diberbagai kesempatan seperti halnya program kegiatan pengembangan Nilai-nilai Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Lumajang dengan sasaran Kecamatan serta lembaga sekolah baik formal maupun Non formal.
- Antisipasi terhadap kemungkinan munculnya faham baru secara radikal di berbagai wilayah terus di pantau mengingat keluar masuknya orang asing/pekerja asing dikhawatirkan dapat membawa faham baru yang dapat mempengaruhi masyarakat. Sampai saat ini belum ada laporan yang mengarah terhadap perkembangan faham radikal maupun faham ekstrim yang mengancam ideologi bangsa Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang.
- Upaya melakukan pengawasan, pemantauan dan pembinaan secara langsung terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing secara terkoordinasi antara anggota Tim sesuai keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/209/427.12/2019 serta pengawasan organisasi kemsyaratkan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017.

#### B. POLITIK

1. Permasalahan politik di Indonesia di 2019 bukan hanya tentang politik identitas tetapi ada beragam hal permasalahan dari hoax atau berita palsu saat ini di era teknologi yang semakin canggih kita dituntut untuk belajar menerima hal positif dan negatif yang ditimbulkan dari dampak perkembangan teknologi, cerdaslah dalam bermedia sosial karena Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Adapun Langkah yang penting dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajangdiantaranya :

- Edukasi politik dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Bagi Pemilih Pemula serta Ormas yang bertujuan untuk keikutsertaan Ormas serta pemilih pemula dalam menciptakan iklim politik yang sehat sehingga terwujud situasi dan kondisi politik yang kondusif, tertib dan aman di wilayah kabupaten lumajang, serta dapat mewujudkan kerja sama hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Lumajang ;
- Diskusi publik bertujuan membangun pengetahuan politik masyarakat, membangun karakter masyarakat atau warga negara, seperti bersikap kritis, terbuka, jujur dan rasional, serta membangun kecakapan masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi Lumajang hebat dan bermartabat.

#### 2. PILKADES SERENTAK 2019

Dasar hukum penyelenggaraan pilkades kabupaten lumajang

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lumajang nomor 23 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2018.

Adapun skema potensi kerawanan Pilkades berada pada Tahapan-tahapan Pilkades diantaranya :

Tanggal	Kegiatan	Kerawanan
	Rangkaian Proses Pilkades	
<b>PERSIAPAN</b>		
10 JUNI s/d 14 JUNI 2019	Koordinasi opd terkait persiapan pelaksanaan pilkades serentak gelombang ketiga tahun 2019	Tidak ada kerawanan karena dianggap kekurangan yang ada saat Pilkades sebelumnya menjadi bahan koreksi dan evaluasi.
17 JUNI 2019	Persiapan sosialisasi	Tidak ada kerawanan karena persiapan sosialisasi pilkades merupakan paparan hasil rumusan perda dan perbup pilkades
18 JUNI 2019	Sosialisasi pilkades serentak 2019 bagi instansi terkait	Tidak ada kerawanan mengingat Kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan komitmen bersama dalam melakukan persiapan dan mengantisipasi kerawanan atau konflik sosial saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
19 JUNI 2019	Sosialisasi pilkades serentak bagi camat	Tidak ada kerawanan mengingat Kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan komitmen bersama dalam melakukan persiapan dan mengantisipasi kerawanan atau konflik sosial saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di tingkat Kecamatan
20 JUNI 2019	Pembentukan panitia pemilihan kabupaten	Tidak ada kerawanan dikarenakan hal tersebut merupakan pembentukan tim antisipasi kerawanan atau konflik sosial serta proses saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak
21 JUNI 2019	Pembentukan panitia pemilihan kabupaten	-
22 JUNI 2019	Pembentukan panitia	-

	pemilihan kabupaten	
25 JUNI 2019	Pembentukan panitia pengawas (11 kecamatan)	Ketrawanan berada pada kapasitas dan kapabilitas personel pengawas pemilu
26 JUNI 2019	Pembentukan bpd kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan, tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat	Tidak ada kerawanan prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan
27 JUNI S/D 8 JULI 2019	1. Pembekalan kepada 3 panwas, 158 kepala desa berpilkades dan 158 bpd berpilkades 2. Pembentukan panitia pemilihan oleh bpd (10 hari)	Tidak ada kerawanan prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan
09 JULI 2019	1. Pembentukan panitia pemilihan @2 orang perdesa 2. Penyampaian laporan amj kepala desa kepada bupati	Tidak ada kerawanan prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan
10 JULI s/d 20 JULI 2019	Pengajuan rencana biaya pemilihan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui camat (10 hari)	Tidak ada kerawanan prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan
22 JULI s/d 27 JULI 2019	Persetujuan biaya pemilihan dari bupati	Tidak ada kerawanan prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan
29 JULI 2019	Penetapan jumlah wilayah perolehan suara dan pembagian jumlah pemilih dalam wilayah perolehan suara dituangkan dalam berita acara	1. Pemilih tidak masuk dalam DPT, pemilih tidak sesuai dengan alamat dusun/pedukuhan 2. Warga yang bukan penduduk desa masuk ke dalam DPT
30 JULI 2019	Koordinasi persyaratan administrasi balon kepada instansi terkait	Tidak ada kerawanan prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan
31 JULI 2019	Sosialisasi persyaratan administrasi balon kepada panwas (21 kecamatan @2 orang)	Tidak ada kerawanan prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan
1 AGUSTUS s/d 3 AGUSTUS 2019	Sosialisasi persyaratan administrasi balon kepada masyarakat (panitia pemilihan kabupaten, panitia pengawas, panitia pemilihan)	Bakalan calon kepala desa tidak paham dengan persyaratan dan pro aktif dengan panitia, panitia tidak netral tentang pengumuman terhadap bakalan calon kepala desa
5 AGUSTUS s/d 22 AGUSTUS 2019	Penjadwalan pemenuhan syarat bagi bakal calon	Keterbatasan waktu persyaratan/ Perlunya penambahan waktu
<b>PENCALONAN</b>		

23 AGUSTUS s/d 2 SEPTEMBER 2019	Pengumuman dan pendaftaran balon (9 hari)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balon tidak mendapatkan rekomendasi syarat pencalonan bebas dari hutang dan pajak yg dikeluarkan Inspektorat Kab. Lumajang</li> <li>2. Ijazah palsu yang tidak sesuai yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan</li> <li>3. Nama tidak sesuai dengan dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan</li> <li>4. Pendaftar berasal dari luar desa pelaksana pilkades</li> <li>5. Keterbatasan waktu penutupan pendaftaran</li> </ol>
3 s/d 25 SEPTEMBER 2019	Penyaringan balon I (penelitian kelengkapan syarat administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon) (20 hari)	Protes balon terkait berkas yang tidak sesuai dengan institusi/lembaga yang mengesahkan
26 SEPTEMBER s/d 18 OKTOBER 2019	Perpanjangan waktu pendaftaran (20 hari)	Tidak ada kerawang karena terpemilihnya bakal jalan lebih dari 1
19 OKTOBER s/d 12 NOPEMBER 2019	Penyaringan balon II (penelitian kelengkapan syarat administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon) (20 hari)	Protes balon terkait berkas yang tidak sesuai dengan institusi/lembaga yang mengesahkan
13 NOPEMBER 2019	Pemberitahuan hasil penelitian dan klarifikasi kepada balon, dilanjutkan pengumuman kepada masyarakat	Protes warga yang mendukung balon yang tidak lolos tahapan penetapan
14 NOPEMBER 2019	Seleksi tambahan (pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, pengalaman kerja di lembaga kemasyarakatan desa, tingkat pendidikan, usia dan uji kompetensi), dilanjutkan pemberitahuan hasil seleksi tambahan kepada balon, dilanjutkan pengumuman kepada masyarakat	Protes warga yang mendukung balon yang tidak lolos tahapan penetapan
15 NOPEMBER 2019	Permohonan seleksi tambahan (uji kompetensi) oleh panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten melalui camat	Ketidak puasan bakal calon dari hasil selisih point yang diperoleh antara yang memiliki pengalaman dan yang tidak berpengalaman sesuai perbup no.45 tahun 2019 yang ditetapkan
18 NOPEMBER 2019	Persiapan pelaksanaan seleksi tambahan (uji kompetensi)	Netralitas tim penguji kompetensi bakal calon Kepala Desa

19 NOPEMBER 2019	Pelaksanaan seleksi tambahan (uji kompetensi) dilanjutkan pemberitahuan hasil seleksi tambahan kepada balon, dilanjutkan pengumuman kepada masyarakat melalui panitia pemilihan	Protes warga yang mendukung balon yang tidak lolos tahapan uji kompetensi
21 NOPEMBER 2019	Pelaksanaan seleksi lanjutan (berupa uji kepemimpinan melalui wawancara tertutup hanya bagi yang nilai terendah sama)	Neutraitas tim pengujii kompetensi (uji kepemimpinan melalui wawancara tertutup) bukalan calon Kepala Desa
22 NOPEMBER 2019	Persiapan pelaksanaan penetapan calon (min 2, maks 5)	Protes bakal calon dan pendukung bakal calon yang tidak lolos
23 NOPEMBER 2019	1. Penetapan calon (min 2, maks 5) 2. Pengundian nomor urut bagi calon, dilanjutkan penetapan nama, foto dan para saksi 3. Pengumuman hasil penetapan ke masyarakat	1. Protes bakal calon dan pendukung bakal calon yang tidak lolos 2. Protes balon karena tidak sesuai nomor urut yang diinginkan
25 NOPEMBER s/d 10 DESEMBER 2019	1. Ikrar damai 2. Penyediaan/percetakan surat suara 3. Sosialisasi desain surat suara dan pelipatan kertas suara 4. Simulasi pada pantwas	Kerawanan berada pada penyediaan/percetakan surat suara disebabkan dari surat suara yang telah tereoblos
11 DESEMBER s/d 13 DESEMBER 2019	Kampanye (3 hari)	1. Gesekan antar pendukung 2. Money politik 3. Intimidasi 4. Protes penempatan APK yang tidak sesuai 5. Pengrusakan APK oleh Oknum 6. Neutraitas Panitia, BPD dan Perangkat Desa
14 s/d 17 DESEMBER 2019	Masa tenang (3 hari)	1. Kampanye terselubung 2. Money Politik 3. Serangan Fajar 4. Intimidasi

#### PEMUNGUTAN SUARA

18 DESEMBER 2019	Hari pemungutan suara	1. Tingkat kehadiran yang kurang dari 50% 2. Pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan undangan 3. Neutraitas Panitia Pemilihan Kepala Desa 4. Neutraitas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa 5. Pengaruh masuknya penjudi pemilihan Kepala Desa 6. Penjemputan warga pemilih bertempat tinggal plosok
------------------	-----------------------	--

19 DESEMBER 2019	Materi uji (jika draw), bisa dilanjutkan undian	Tidak legowonya/kekecewaan balon serta pendukung balon yang dikalahkan berdampak pada anarkisme.
20 DESEMBER 2019	Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada bpd	Terjadi laporan yang tidak sesuai dengan perbup no.45 Tahun 2019
21 DESEMBER 2019	Laporan bpd mengenai calon terpilih kepada bupati melalui camat	Tidak ada kerawanan karena sudah sesuai mekanisme
23 s/d 26 DESEMBER 2019	Penyelesaian awal perselisihan hasil pilkades (3 hari)	Pendukung/tim sukses sama-sama tidak menerima hasil pilkades tersebut
27 s/d 30 DESEMBER 2019	Penyelesaian lanjutan (3 hari)	Pendukung/tim sukses sama-sama tidak menerima hasil pilkades tersebut

#### PENETAPAN

31 DESEMBER 2019	Pembertiban keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kades	Ketidak puasan pendukung/tim sukses terhadap hasil penetapan yang dikeluarkan Bupati dikarenakan Kepala Desa terpilih tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
01 s/d 07 JANUARI 2020	Persiapan pelantikan calon terpilih	Protes dari pihak pendukung/Tim sukses dari Calon Kepala Desa yang kalah.
08 JANUARI 2020	Pelantikan calon terpilih	Protes dari pihak pendukung/Tim sukses dari Calon Kepala Desa yang kalah.
09 s/d 11 JANUARI 2020	Pertanggungjawaban pelaksanaan pilkades oleh panitia pemilihan kepada bpd (3 hari)	Laporan tidak sesuai perbup no.45 Tahun 2019 serta penggunaan anggaran pelaksanaan tidak sesuai pagu yang ditetapkan
13 JANUARI 2020	Pembubaran panitia pemilihan oleh bpd (keputusan bpd), dilaporkan kepada bupati melalui camat	Tidak ada kerawanan karena sudah sesuai tahapan dan perbup yang ada

Tingkat kerawanan sosial dan potensi konflik Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Lumajang menjadi perhatian khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbungpol), maka perlu melaksanakan kerjasama dengan menggelar Forum Komunikasi Sinergitas Tiga Pilar Kecamatan dan Desa dalam rangka Kewaspadaan, Deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial pada tahapan Pilkades ( Pemilihan Kepala Desa Serentak ) tahun 2019 di Kabupaten Lumajang. Adapun hal-hal pencegahan kerawanan di setiap tahapan sebagai berikut :

- Menyusun strategi pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencenggahan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dan Sengketa, dengan mempertimbangkan karakter serta kondisi di Daerah masing-masing;
- Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan penyelenggara Pilkades serentak serta stakeholder pilkades terutama pemerintah Daerah, kepolisian Daerah, Tim Kewaspadaan Dini serta Toga dan Tomas dalam rangka mendapatkan data dan informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan konflik sosial pada saat Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2019;

- Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye serta bakalan calon, baik melalui koordinasi maupun melalui media sosial dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran guna menekan konflik sosial sedini mungkin.

### 3. REKOMENDASI PILKADES SERENTAK 2019

Mengingat Pilkades serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019 di Kabupaten Lumajang masih ada potensi kerawanan yang dapat memicu konflik sosial, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang menyadari bahwa upaya pencegahan membutuhkan partisipasi banyak pihak. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Lumajang merekomendasikan kepada sejumlah pihak beberapa hal berikut ini :

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM)

- Mengoptimalkan supervisi terhadap struktur di bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pilkades 2019;
- Memastikan Profesionalisme struktur di bawahnya dalam rangka menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2018;
- Memberikan jaminan dan proses percepatan dalam penyediaan serta penyaluran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- Memberikan perhatian khusus pada masalah proses pencalonan dan pada diskualifikasi bakal calon Kepala Desa;
- Memastikan setiap TPS mudah dijangkau pemilih.

b. Peserta Calon Kepala Desa

- Melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu-isu SARA, penggunaan politik uang, menghindari pelibatan BPD, Panitia pelaksanaan pemilihan, perangkat desa;
- Mematuhi ketentuan peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2019 di setiap tahapan Pemilihan Kepa Desa.

c. Pemerintah Daerah

- Melakukan supervisi terhadap kepastian proses penganggaran dan pencairan anggaran pemilihan kepala desa oleh pemerintah desa;
- Menindak lanjuti setiap rekomendasi pengawas pemilihan Kepala Desa terkait pelanggaran-pelanggaran pada saat menjelang, saat pelaksanaan pemilihan Kepa Desa.

d. Aparat keamanan/Penegak Hukum

- Memberikan perlindungan terhadap penyelenggara pemilihan kepala desa dari potensi tindak kekerasan;
- Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil dan mandiri tanpa ada intimidasi dari pihak – pihak yang berkepentingan yang mengancam terutama kekerasan fisik terhadap pemilih.

e. Masyarakat umum

- Masyarakat terlibat aktif dalam mengawal proses pemilihan kepala desa serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi;
- Masyarakat juga berperan aktif untuk menjaga stabilitas desa pada saat menjelang maupun saat pemilihan kepala desa dengan pelibatan tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

## C. EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

### 1. PERMASALAHAN TAMBANG PASIR

Terkait tata kelola Tambang Galian C (Pasir dan Batu) yang dirasa masih kurang efektif dan tidak efisien. Permasalahan cenderung sedikit demi sedikit/skala kecilakan muncul ke permukaan dimulai dari pengajuan ijin penambangan, pengangkutan, penyimpanan di stockpile, pengiriman dalam dan luar kota, membayar kewajiban untuk PAD, yang kesemuanya bermasalah yang cepat atau lambat akan menjadikan dampak maupun gangguan sehingga tercipta kehidupan yang instabilitas, yang berdampak negatif pada banyak komunitas. Hal ini sangat faktual di lapangan melibatkan banyak kepentingan, banyak golongan, banyak pelanggaran/menabrak regulasi serta tidak menghiraukan aturan main.

Secara rinci dalam nuansasebab akibat adalah sebagai berikut :

- Proses permohonan ijin penambangan maupun proses perpanjangan cukup jauh dan biaya tinggi, akibatnya muncul penambang liar, penambang berijin tapi tidak berlabel, menekan biaya operasional dengan tidak taataturan (tanpa SKAB), pembuatan Stockpile tanpa ijin, pengurangan tenaga tradisional, mengurangi sumbangan ke desa, yang pada akhirnya muncul kecemburuhan sosial maupun kerusakan lingkungan.
- Pengaturan pembuatan / ijin stockpile sangat lemah, akibatnya stockpile yang ada tidak by name by address, lokasi tidak melihat tata lingkungan.
- Pengaturan jenis kendaraan angkutan pasir, pengaturan jalan yang harus dilalui, pengaturan waktu pengirimanserta tonase daya angkut kurang efektif, sehingga akibat pada terganggunya jalanan pengendara kendaraan kecil. Seringnya badan jalan dan berem jalan rusak berat. Sehingga sering terjadi kecelakaan maupun kerusakan kendaraan lain.
- Penerapan SKAB maupun operasi kendaraan angkutan pasir dan batu, kurang efektif dan kurang efisien akibatnya banyak jalan tikus rusak berat, PAD tidak tercapai, kemacetan kendaraan angkutan pasir dan batu sering terjadi, baik karena kondisi kendaraan maupun karena tonase yang over kapasitas.
- Tingkat keikutsertaan oknum suatu institusi dalam usaha pasir dan batu cukup tinggi, baik turut serta pengawalan, pengawalan maupun lolos sita jaminan, akibatnya pengusaha dan pengemudi selalu menang dalam kesalahan.
- Pasir Lumajang memang sangat menjanjikan sehingga para pemodal besar dari luar Lumajang datang berlomba, sedangkan orang - orang asli Lumajang dominan masuk lingkup pengusaha kecil.

## 2. REKOMENDASI PERMASALAHAN TAMBANG PASIR GALIAN C

- Terkait perijinan, seyogyanya Bupati mengajukan surat Permohonan Peninjauan Kembali dan atau memohon sebagian kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur dengan Tembusan kepada Menteri ESDM, tentang:
  - Penerimaan berkas lengkap dari pemohon ijin barutambang galian C beserta pembayarnya, yang selanjutnya disertai surat pengantar Bupati diajukan ke provinsi Jawa Timur (Dinas ESDM).
  - Memberikan rekomendasi awal kelayakan untuk proses perijinan.
  - Menerima berkas lengkap dan menandatangani perpanjangan ijin galian C.
- Menyusun dan / atau meninjau kembali PERDA Tahun 2006 tentang tata Kabupaten Lumajang No: 18 Tahun 2006 kelola tambang galian C yang didalamnya mengakomodir muatan local seperti:
  - Penetapan kawasan tambang galian C
  - Penetapan jenis kelas jalan
  - Penetapan jenis alat angkutan
  - Penetapan batas muatan / tonase
  - Penetapan perdirian areal penyimpanan (stockpile) secara by name by address
  - Penetapan jalur pengiriman ke luar Lumajang
  - Penetapan sanksi yang jelas dan tegas

- Menetapkan dan mengatur kembali Satuan Petugaslapangan secara terpadu dan terintegrasi yang dilampelaksanaan tugasnya tidak terputus waktu.
- Memfasilitasi dan mengintegrasikan tambang ilegal dan /atau tradisional melalui satu nama perijinan dalam satutubuh perusahaan daerah (PD) Semeru, sekaligusmenunjuk Direksi PD Semeru sebagai Ketua AsosiasiPengusaha Tambang Galian C Lumajang, untuk pertamakalinya
- Meninjau kembali dan atau menyempurnakan tandabukti penarikan Pajak / Retribusi (Kartu Kendali / SKAB)termasuk kejelasan Kartu Kendali / SKAB
- Meninjau kembali dan / atau kaji ulang terhadap rencana kenaikan pajak /retribusi apabila disbanding dengan pelayanan dan pengendalian yang diberikan Pemerintah Daerah seperti ketersediaan alat ukur /imbangan serta proses perijinan.

#### IV. PENUTUP

Demikian Pandangan kajian dan rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang sebagai masukan dalam penetapan kebijakan Pemerintah dengan harapan Keamanan dan kenyamanan masyarakat Lumajang meningkat dalam kehidupan yang sejahtera, aman, damai dan kondusif demi terwujudnya Lumajang yang hebat dan bermartabat sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang.







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
LAPORAN KINERJA (LKJ)**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

 <p style="text-align: center;"><b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG</b></p>	Nomor SOP	:	050/1552/427.75/2019		
	Tanggal Pembuatan	:	9 Juli 2019		
	Tanggal Revisi	:	15 Juli 2019		
	Tanggal Pengesahan	:	15 juli 2019		
	Disahkan Oleh	<b>Kepala Bakesbangpol Kab. Lumajang</b>			
Nama SOP		<b>Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)</b>			
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>				
1. Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja	1. Memahami Kebijakan mengenai Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 2. Memiliki pemahaman tentang Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Mekanisme Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Memiliki kemampuan Mengevaluasi Perjanjian Kinerja dan Membuat pelaporan Kinerja				
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Periengkapan</b>				
1. SOP Penyusunan Laporan Tahunan 2. SOP Surat Keluar dan SOP pengiriman	1. Instrumen monitoring dan Evaluasi Kinerja (Dokumen DPA) 2. Pedoman Perjanjian Kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja instansi 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya				
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>				
Apabila dokumen penetapan kinerja, DPA dan Laporan Realisasi Anggaran tidak ada maka evaluasi tidak dapat dilakukan	1. Dokumen Laporan Kinerja				

**SOP : LAPORAN KINERJA (LKJ)**

NO	URATAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kesubag Umum / Tim Akuntabilitas	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan LKJ	MULAI				Surat masuk	10 Menit	Disposisi surat	SOP Surat masuk
2.	Membentuk tim dan memberi pengarahan					Disposisi surat masuk	20 menit	Tim penyusun LKJ	
3.	Mengumpulkan, mempelajari dan mengevaluasi bahan dan instrumen evaluasi serta menyusun konsep LKJ					DPA, Renja, Laporan periodik fisik maupun realisasi keuangan, Dokumen hasil evaluasi kinerja	1 Minggu	DPA, Renja, Laporan periodik fisik maupun realisasi keuangan, Dokumen hasil evaluasi kinerja, Konsep LKJ	
4.	Mengetik konsep LKJ dan diserahkan ke kesubag Renvapor					Konsep LKJ	3 Hari	Draft dokumen LKJ	
5.	Memeriksa draft dokumen LKJ jika setuju diajukan kepada Sekdin, jika tidak diserahkan ke operator untuk segera diperbaiki					Draft dokumen LKJ	2 Hari	Draft dokumen yang sudah diperbaiki	
6.	Memeriksa Draft dokumen LKJ Jika setuju diparaf untuk diajukan ke kepala Dinas untuk ditandatangani, Jika tidak diserahkan kepada Kesubag untuk diperbaiki					Draft dokumen yang sudah diperbaiki	3 Hari	Dokumen LKJ yang sudah diparaf	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubag Umum / Tim Akuntabilitas	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Menandatangani Dokumen LKJ					Dokumen LKJ yang sudah diparaf	15 Menit	Dokumen LKJ yang sudah ditanda tangani	
8.	Memerintahkan staf untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan					Dokumen LKJ yang sudah ditandatangani	10 Menit	Dokumen LKJ yang sudah ditandatangani	
9.	Mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan					Dokumen LKJ yang sudah ditandatangani	30 Menit	Bukti pengiriman, laporan	SOP Surat keluar dan SOP Pengiriman

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG







## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BANDAR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : [kesbangpol@lumajang.go.id](mailto:kesbangpol@lumajang.go.id)  
LUMAJANG - 67313

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.45/1630/427.75/2019  
TENTANG

#### TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

#### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG

**Menimbang :** Bawa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang

**Mengingat :**

1. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUMAJANG**

**KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lumajang;
- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
- d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar / dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli 2019

Ditetapkan di Lumajang  
Pada Tanggal 25 Juli 2019



**SUSUNAN**  
**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Drs. BASUNI NIP. 19670604 199302 1 001
2.	Ketua	Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM. NIP. 19670604 199302 1 001
3.	Sekretaris	LULUK MASLUHA NIP. 19630929 198510 2 002
4.	Anggota	1. DWI ELIAGUSTIN, SE NIP. 19780811 201101 2 005 2. SUSILO, SH NIP. 19640714 199403 1 003 3. WIWIK HARIYANI, SE NIP. 19750512 199403 2 002 4. GURUH EKO YULIANTO, S.Sos NIP. 19790707 200801 1 021 5. CAHYO IMANTOKO NIP. 19781227 200801 1 010

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LUMAJANG**



Drs. BASUNI  
NIP. 19620727 198512 1 001